



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

MODUL - 0
OVERVIEW PELATIHAN KLHS

Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah

PELATIHAN KLHS RPJMD
Jogjakarta, 22 – 24 MARET 2016

Tujuan & Output Pelatihan



TUJUAN

- Memberikan pemahaman tentang pelaksanaan KLHS RPJMD

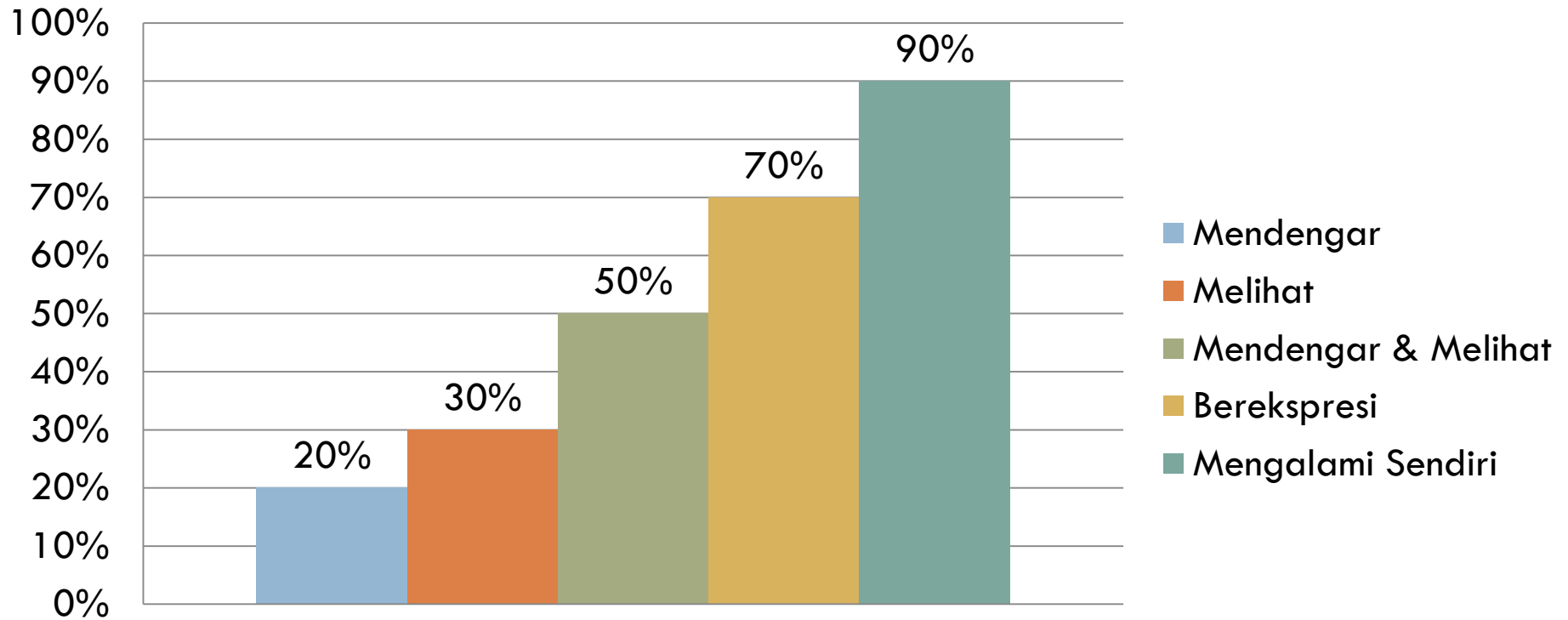
OUTPUT

- Adanya pemahaman pelaksanaan KLHS RPJMD
- Tersusunnya Rancangan Kerangka Acuan Kerja (KAK) KLHS RPJMD (Provinsi & Kabupaten/Kota)

Metologi Pelatihan



CARA BELAJAR



Metologi Pelatihan



Tidak ada seorangpun yang tahu segalanya
Setiap orang tahu sesuatu

20 %

Teori, belajar sendiri

30 %

Latihan, kerja kelompok, gladi, permainan peran

50 %

Diskusi & kesimpulan dari pengalaman & pembelajaran

Aturan Main Dalam Pelatihan



Lihat Kertas Flip-Chart

Overview Modul KLHS



Overview Agenda Pelatihan



Hari-1	Hari-2	Hari-3
Pembukaan Overview Pelatihan KLHS Pre test	MORNING NEWS Presentasi Hasil	MORNING NEWS
Film KLHS Diskusi	Modul 3 Diskusi	Penyusunan Rancangan KAK KLHS RPJMD Kerja Kelompok
Modul 1 Diskusi	Modul 4 Diskusi	Penutupan
Modul 2 Kerja Kelompok	Modul 5 Diskusi	
	Modul 6 Diskusi	



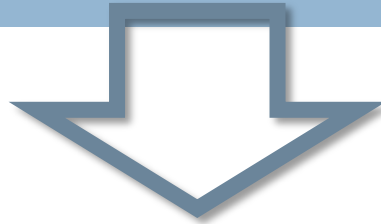
- Seluruh materi diadaptasi dari:
 - UU No. 32 Tahun 2009
 - Permen LH No. 9/2011,
 - Permendagri No. 67/2012
 - serta Pengalaman Empiris Narasumber dan berlaku generik.

PRE- TEST



- Silahkan isi form pre test yg dibagikan, **Tidak perlu** mencantumkan NAMA

SELANJUTNYA.....



**MODUL
PENGANTAR KLHS**



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

MODUL - 1
PENGANTAR KLHS

Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah

PELATIHAN KLHS RPJMD
Jogjakarta, 22 – 24 MARET 2016

MODUL 1 | Materi Paparan



- 1 | Konteks Historis KLHS**
- 2 | Landasan Hukum KLHS**
- 3 | Definisi KLHS**
- 4 | Kaidah Pelaksanaan KLHS**
- 5 | Evolusi Paradigma KLHS**
- 6 | Ranah KLHS**
- 7 | Obyek KLHS**
- 8 | Muatan KLHS**
- 9 | Tipologi KLHS**
- 10 | Tahapan Pelaksanaan KLHS**

MATERI 1 | Konteks Historis KLHS



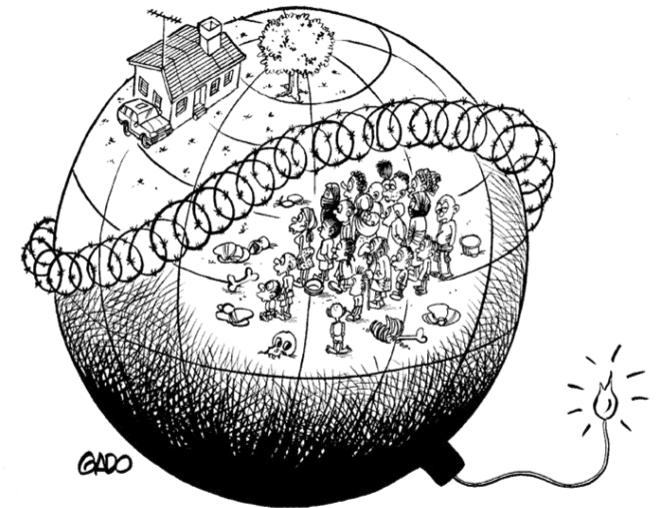
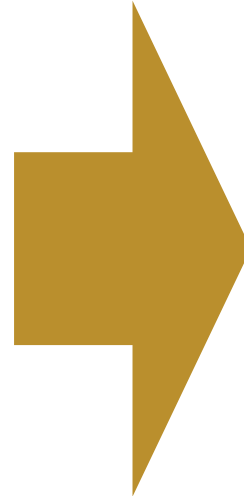
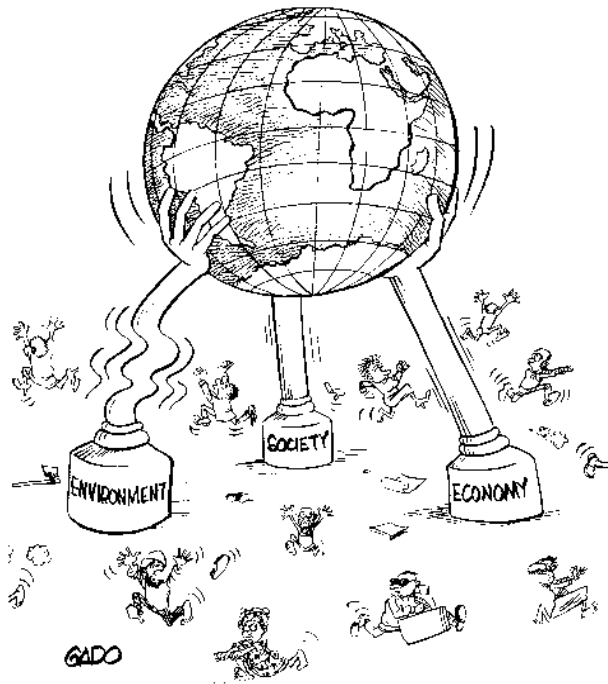
Telah banyak upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan, namun laju pengrusakan lingkungan hidup di tingkat global justru meningkat.

AMDAL tidak mampu mengatasi semua permasalahan di atas.

Masalah lingkungan hidup bersifat lintas batas, lintas sektor, lintas pemangku kepentingan, maka diperlukan kejasama antar berbagai pihak.

Maka perlu dikembangkan pendekatan baru yang mampu mendeteksi permasalahan pada tingkat hulu (kebijakan, rencana, program)
→
KLHS

KLHS : Upaya Menyejahterakan Manusia



Faktor pendorong kegiatan ekonomi yang tidak terkendali dan perubahan sosial budaya masyarakat tanpa landasan pengetahuan dan kesadaran yang cukup akan membebani lingkungan.

Memperbesar kesenjangan kesejahteraan antar kelompok masyarakat dan meningkatkan kerentanan dan risiko terhadap bencana

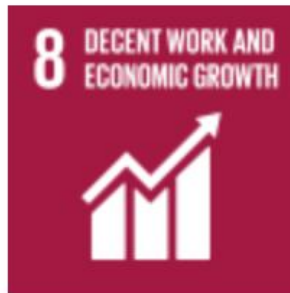
KLHS : Upaya Menyejahterakan Manusia



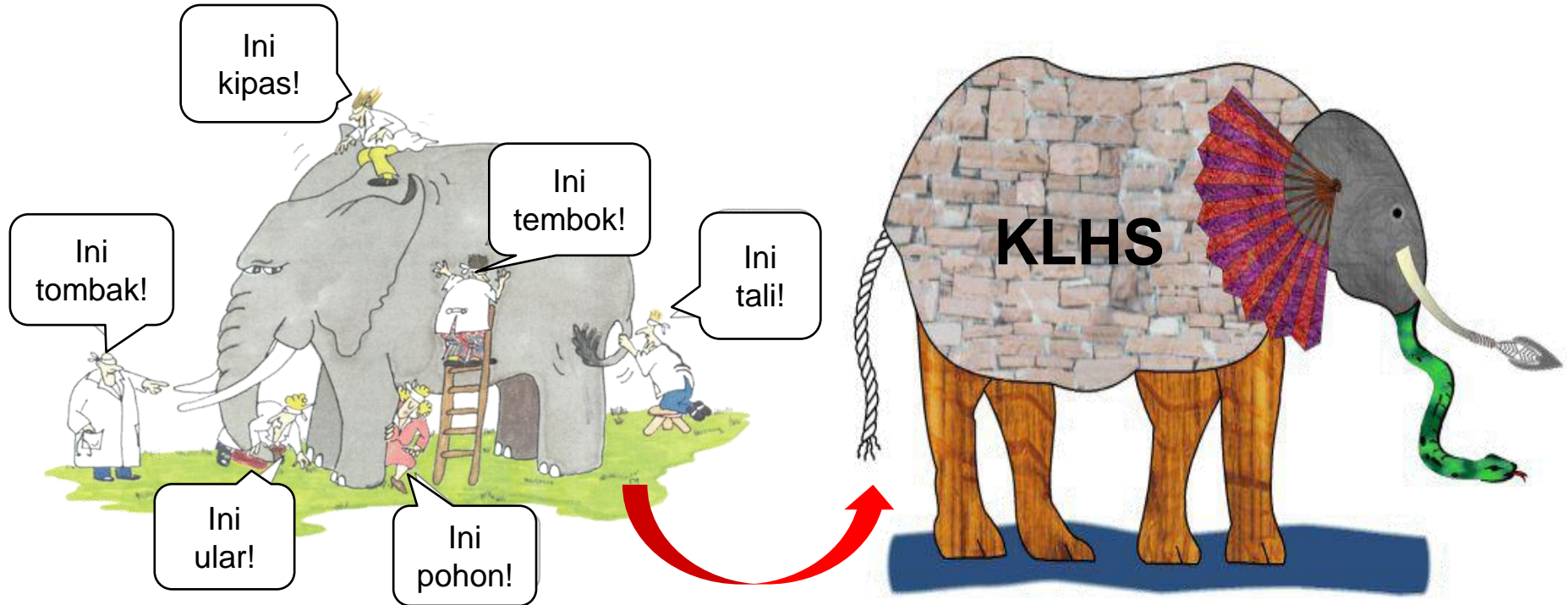
MENCAPAI KESEJAHTERAAN MANUSIA BERDASARKAN KESEIMBANGAN ANTARA EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN LINGKUNGAN



Sustainable Development Goals



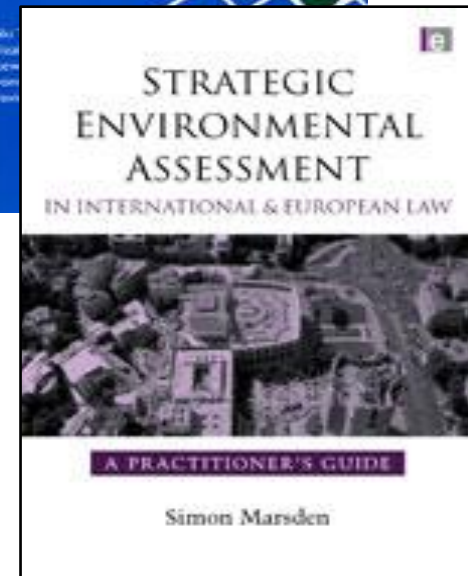
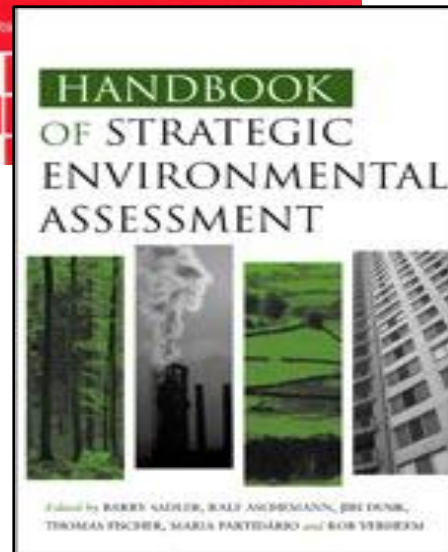
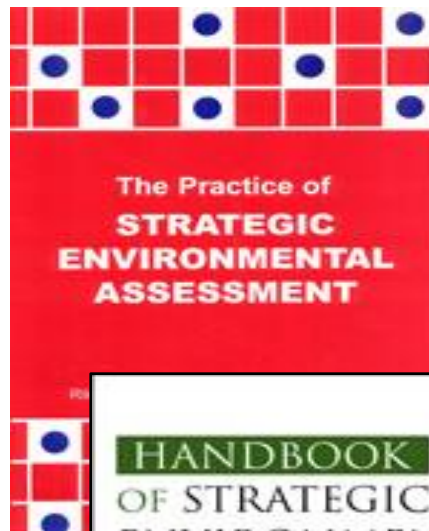
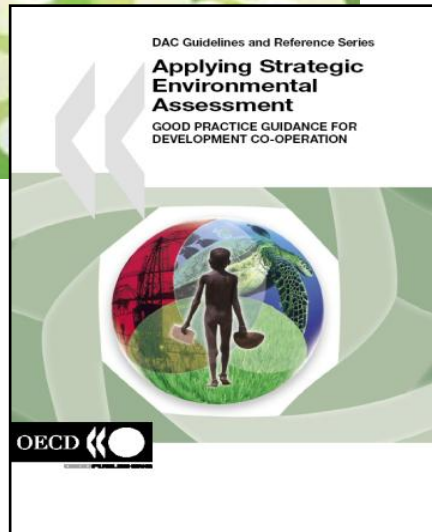
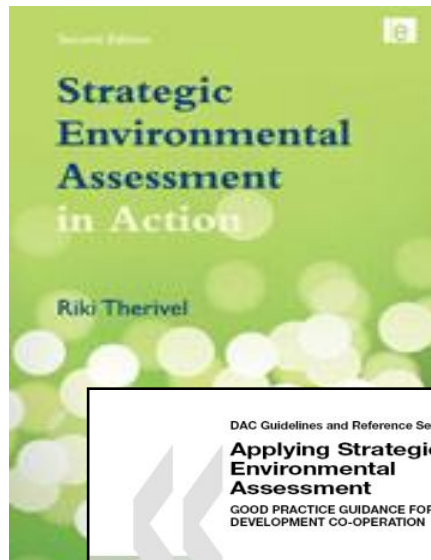
KLHS: Upaya membantu pengambilan keputusan dari berbagai sudut pandang



MELIHAT PERMASALAHAN DARI BERBAGAI SUDUT PANDANG
MAU MENDENGAR, MAU MELIHAT DAN MAU MERASA SUDUT PANDANG ORANG LAIN

SATUKAN SUDUT PANDANG → Dapatkan gambaran yang utuh dan buatlah keputusan yang baik

BEBERAPA REFERENSI



Konteks Historis KLHS – Nasional

Perubahan Paradigma Lingkungan Hidup

- 1 **Perlindungan Lingkungan Hidup merupakan bagian dari kegiatan rutin sehari-hari.**
- 2 **Penegasan kewajiban, tugas dan tanggung jawab pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan LH**
- 3 **Penegasan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup**
- 4 **Pertimbangan aspek pembangunan berkelanjutan pada bagian hulu perencanaan pembangunan dan penataan ruang**
- 6 **Penegasan aspek pengawasan dan pemberian sanksi (administrasi dan pidana)**

Konteks Historis KLHS – Nasional

Perubahan Paradigma Lingkungan Hidup

KONSEP UU 32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan LH



Konteks Historis KLHS - Nasional



1996

- Sejak 1996, Pemerintah menyadari kelemahan AMDAL
- Di Era Otda, kerusakan & pencemaran lingkungan justru meningkat

2006 - 2007

- **2006**, KLH-Bappenas-Kemendagri bersinergi mengembangkan & menerapkan KLHS pada Kebijakan, Rencana, Program
- **2007**, KLH menyusun Konsepsi Arah Kebijakan KLHS di Indonesia
- **2007**, Bangda, Bappenas, KLHS melakukan uji-coba penerapan KLHS di berbagai lokasi

2009 - 2015

- **2009**, UU No.32, tentang PPLH
- **2011**, Permenlh No. 9 tentang Pedoman Umum KLHS
- **2012**, Permendagri No.67 tentang KLHS dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
- **2015**, Surat Edaran No. 4/Menlhk-II/2015

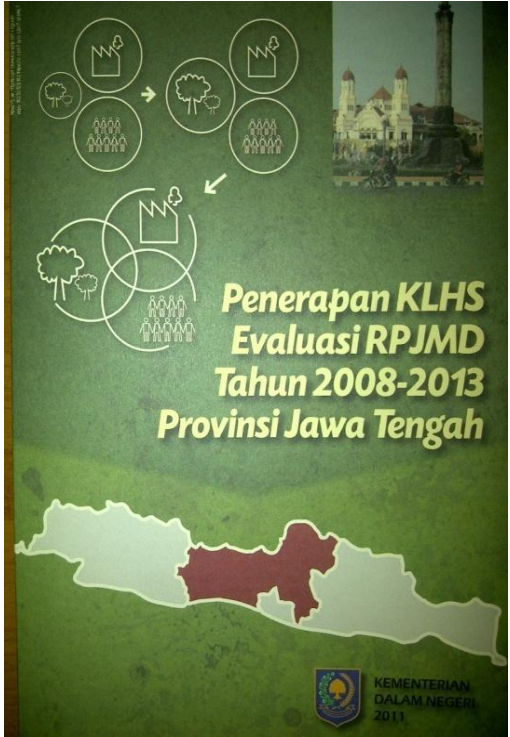
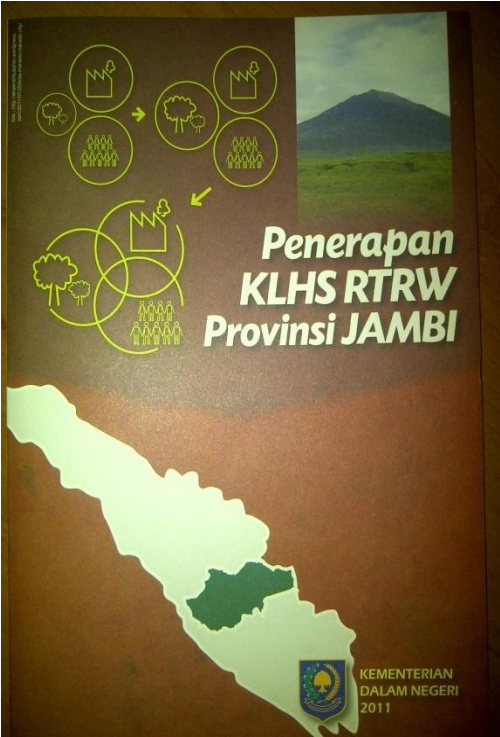
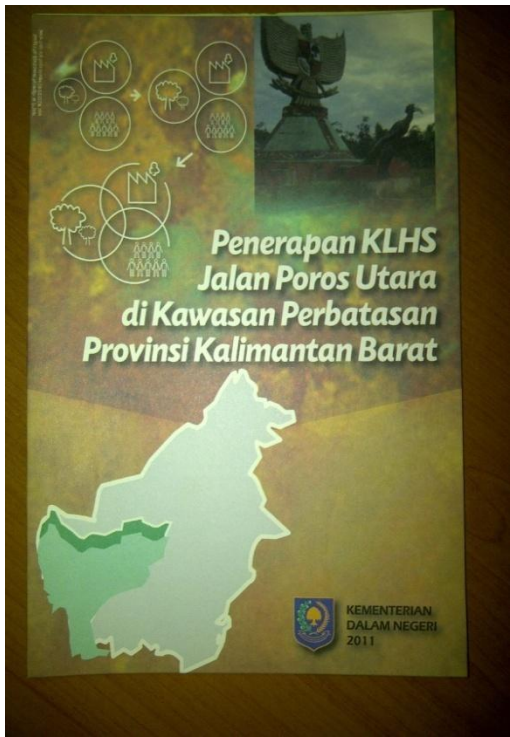


Konteks Historis KLHS - Nasional

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ESP -1	ESP-2				APBN/APBD		
Kota Padang	Kota Serang	Kota Padang	Kota Padang	Prov Jambi	Prov Babel	Prov Sumut	Prov Riau
-	Kab Kubu Raya	Kab Agam	Prov Sumbar	Prov Kalbar	Kab HSU	Prov Jateng	Prov Kepri
-	-	Kab Kubu Raya	Prov Kalbar	Prov Jateng	-	Prov Bali	Kab. Lapung Utara
-	-	Kota Serang	Kab HSS	Prov NTB	-	Prov Sulsel	Kab Inhil
-	-	-	Kota Banjarbaru	Prov Sulut	-	Kab Kuansing	-
-	-	-	Prov Bali	Prov Sulteng	-	Kota P. Pinang	-
Asistensi:	Tim KLHS Daerah Tim Konsultan Nasional		Tim KLHS Daerah Tim Konsultan Nasional, Lokal, Internasional		Pokja PL Konsultan Nas/Lok/Int	Pokja PL Konsultan Nas/Lokal	
Landasan Hukum:		<ul style="list-style-type: none"> Permen LH 27/09 (Juli) UU 32/09 ttg PPLH (Oktober) 		<ul style="list-style-type: none"> Permen LH No. 9/11 (Nov) 	<ul style="list-style-type: none"> Permendagri 67/2012 (Oktober) 		

PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAAN KLHS SETIAP TAHUN

Beberapa Contoh Laporan KLHS Daerah





Pemerintah dan pemerintah daerah **wajib** membuat KLHS dalam penyusunan atau evaluasi:

- Rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, **rencana pembangunan jangka panjang (RPJP)**, dan **rencana pembangunan jangka menengah (RPJM)** nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota; dan
- **Kebijakan, rencana, dan/atau program** yang berpotensi menimbulkan **dampak** dan/atau **risiko** lingkungan



**Pasal 15 ayat (1) dan (2), UU 32/2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Landasan Hukum KLHS



**UU No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup**

**Permen LH No. 9 Tahun 2011 tentang
Pedoman Umum KLHS
(Idealnya PP)**

PEMBANGUNAN DAERAH

**Permendagri No. 67/2012
tentang Pedoman
Pelaksanaan KLHS
dalam Penyusunan atau
Evaluasi
Rencana Pembangunan
Daerah
(RPJPD, RPJMD, RENSTRA)**

TATA RUANG DAERAH

**?
RTRW & Rencana Rinci
Provinsi, Kabupaten/Kota**

MATERI 3 | Definisi KLHS



Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
(Pasal 1, UU 32/2009)

ILMIAH
(teknokratik)

HOLISTIK
(sistemik)

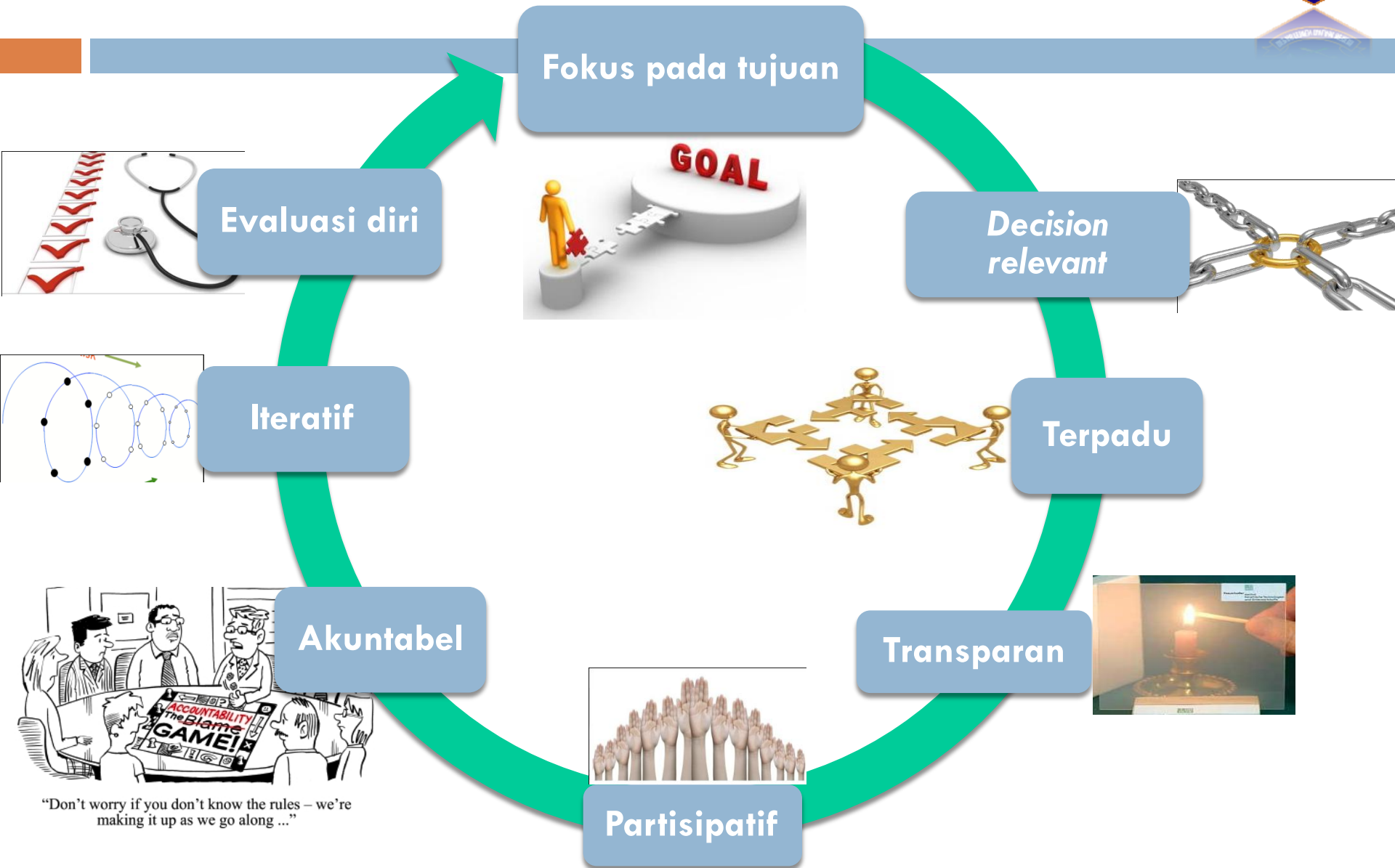
Melibatkan Stakeholder

KETERKAITAN
(internal, vertical, horizontal)

KESEIMBANGAN
(ekonomi-sosbud-lingkungan)

KEADILAN
(antar pokmas & generasi)

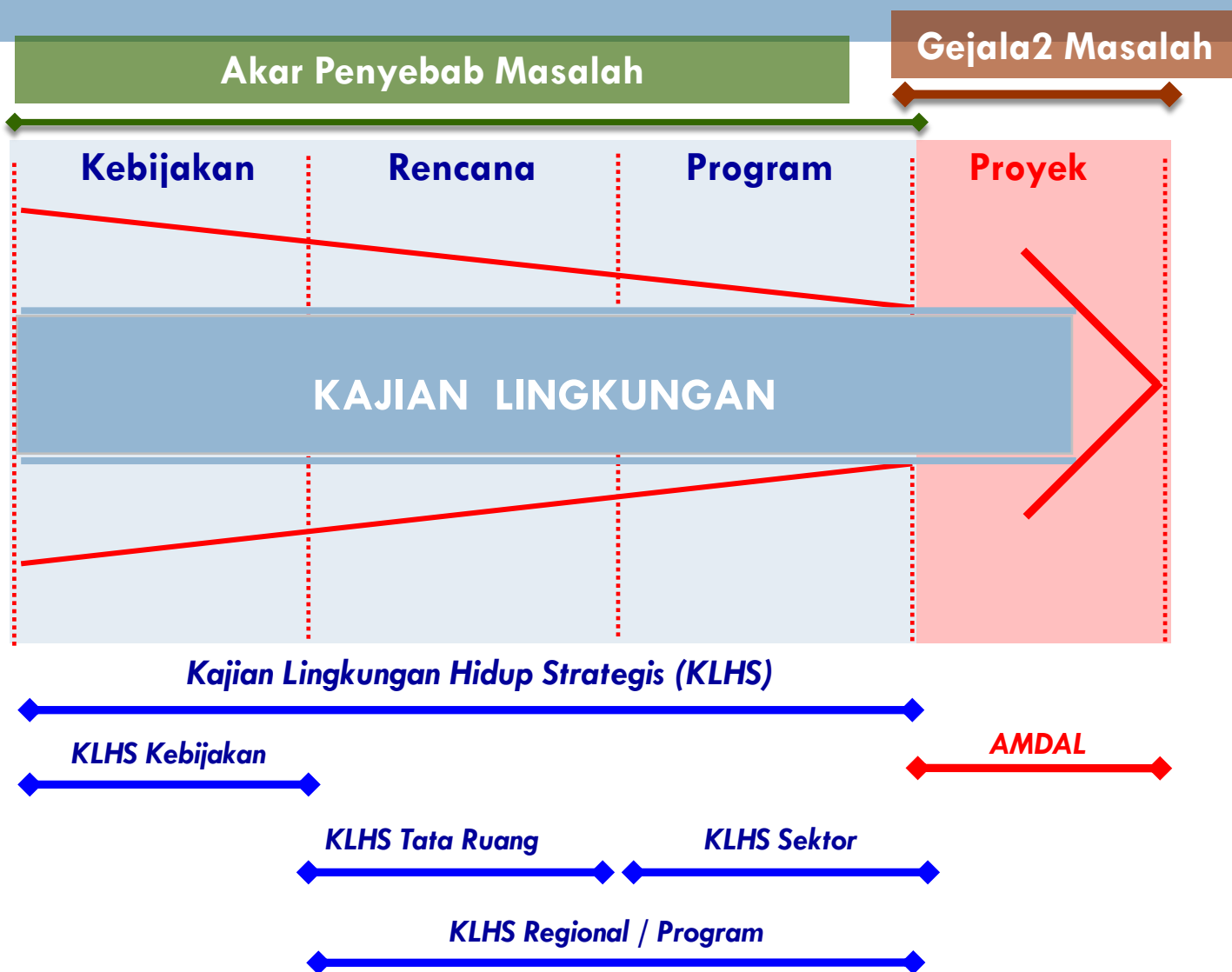
MATERI 4 | Kaidah Pelaksanaan KLHS



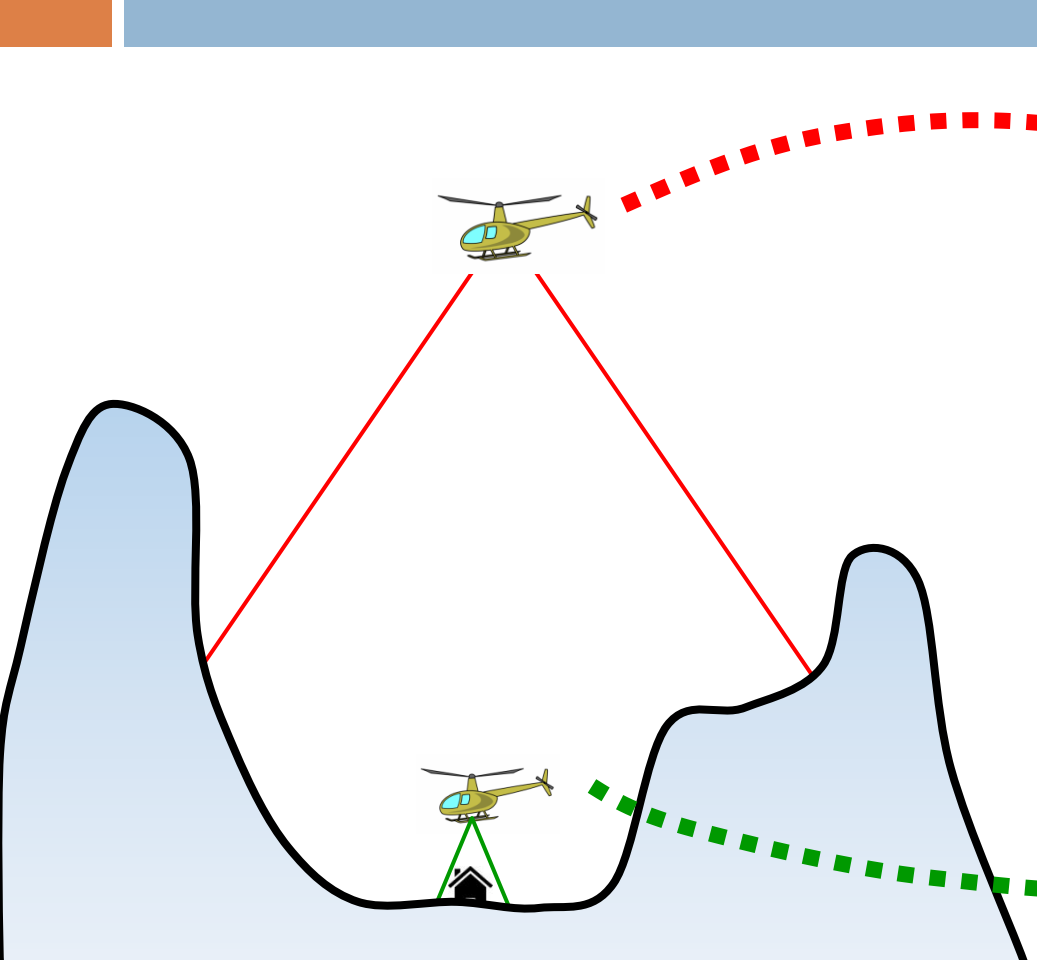
Partisipasi, Konsultasi, Komunikasi dan Pelaporan Publik



MATERI 5 & 6 | Ranah KLHS, Beda KLHS & AMDAL



KLHS: Melihat Lebih Luas dan Menyeluruh



Perbedaan KLHS vs AMDAL



ATRIBUT	KLHS	AMDAL
Level Keputusan	Kebijakan, Rencana & Program	Proyek
Karakter/Sifat	Strategik, visioner, konseptual	Segera, operasional
Output	Umum/garis besar	Rinci/detil
Alternatif	Alternatif regulasi, teknologi, fiskal, atau kebijakan ekonomi	Alternatif lokasi, disain, konstruksi, dan operasi
Dimensi Waktu	Jangka menengah s/d panjang	Jangka pendek s/d menengah
Dampak	Makro, kumulatif	Mikro, terlokalisir
Sumber Data	Laporan pembangunan berkelanjutan, Neraca Lingkungan Hidup	Hasil survey lapang, analisis sampel
Kedalaman Kajian	Lebar, tidak terlampaui dalam	Sempit, dalam, dan rinci
Tipe Data	Lebih banyak bersifat kualitatif & sekunder	Lebih banyak kuantitatif dan primer
Akurasi kajian	Ketidakpastian lebih tinggi	Lebih akurat
Fokus	Agenda keberlanjutan, berupaya untuk memitigasi dampak dan/atau risiko lingkungan	Kajian dampak penting, pengelolaan & pemantauan dampak lingkungan

MATERI 7 | Obyek KLHS



Obyek KLHS Provinsi

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
- b. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi
- c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi;
- d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi;
- e. Kebijakan, rencana, dan/atau program sesuai dengan urusan pemerintah provinsi yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Objek KLHS Kabupaten/Kota

- a. **Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;**
- b. **Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;**
- c. **Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota;**
- d. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota;
- e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota;
- f. Kebijakan, rencana, dan/atau program sesuai dengan urusan pemerintah kabupaten/kota yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Dampak/Resiko Lingkungan



- Perubahan iklim;
- Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
- Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir;
- Longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
- Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
- Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
- Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
- Peningkatan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.



KRP dalam Obyek KLHS

KLHS	RPJPD	RPJMD	RTRW
KEBIJAKAN	<ul style="list-style-type: none">▪ Visi dan Misi▪ Sasaran Pokok & Arah Kebijakan	<ul style="list-style-type: none">• Visi dan Misi• Tujuan dan Sasaran• Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan, Kebijakan dan Strategi (Ranperda)
RENCANA	-	-	Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang (Ranperda)
PROGRAM	-	<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah• Indikasi Rencana Program Prioritas	Indikasi Program Lima Tahun Pertama (Dokumen Teknis RTRW)

Obyek KLHS RPJMD



Visi RPJMN (NAWACITA)

Visi

Misi 1

Misi 2

Misi 3

Tujuan & Sasaran

Tujuan & Sasaran

Tujuan & Sasaran

Strategi &
Arah Kebijakan

Strategi &
Arah Kebijakan

Strategi &
Arah Kebijakan

Program

Program

Program

Program

Program

Program

KEBIJAKAN

PROGRAM

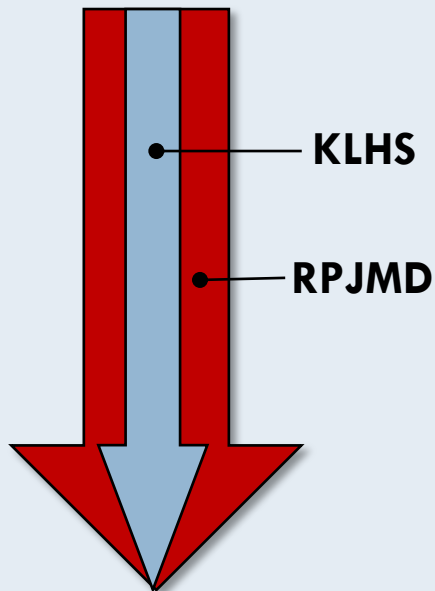


Pasal 16 UU No. 32/2009, muatan KLHS antara lain:

- kapasitas daya dukung & daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
- **perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;**
- kinerja layanan/jasa ekosistem;
- efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- tingkat kerentanan & kapasitas adaptasi thd perubahan iklim;
- tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

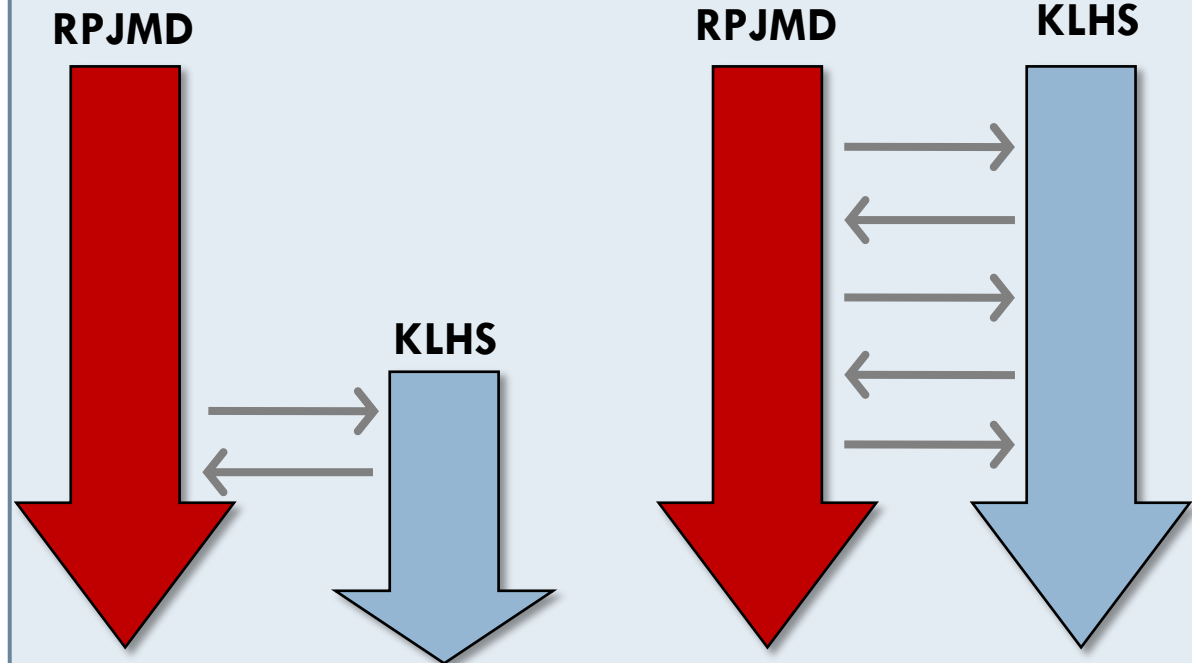


Menyatu (Embedded)



KLHS dilakukan menyatu dalam penyusunan RPJMD (*embedded*)

Terpadu (Integrated)



KLHS dilakukan saat penyusunan RPJMD sudah berjalan

KLHS dilakukan paralel dan terintegrasi dengan proses penyusunan RPJMD

MATERI 10 | TAHAPAN KLHS



1

Pengkajian Pengaruh KRP terhadap Kondisi LH

Pra Pelingkupan

Pelingkupan

Baseline Data

Pengkajian



2

Perumusan Alternatif Penyempurnaan KRP

Identifikasi Langkah-langkah Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif

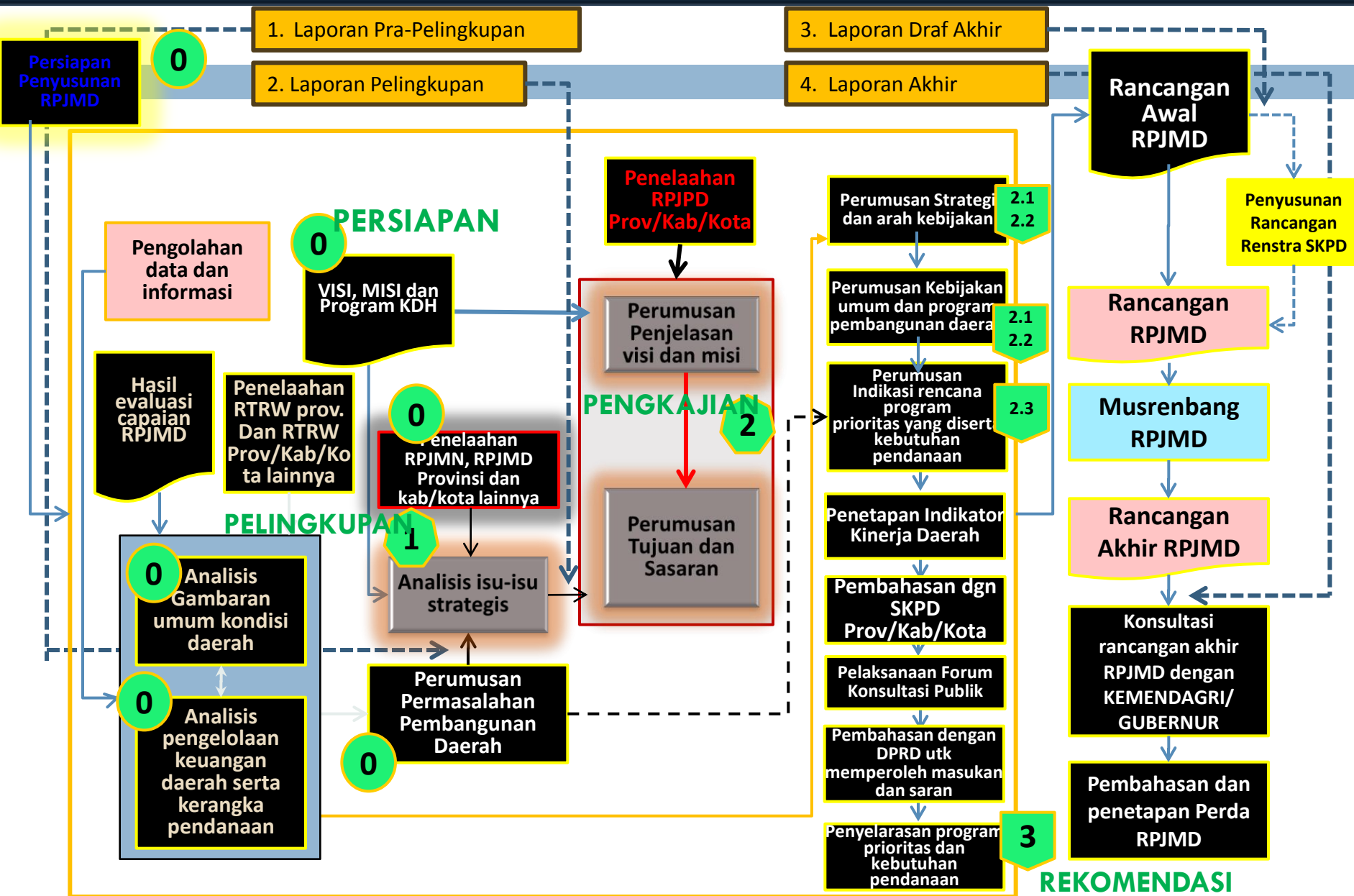


3

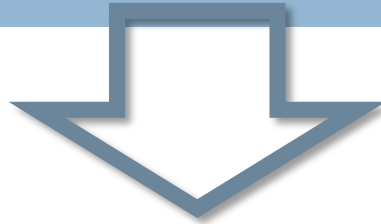
Rekomendasi Perbaikan

Perumusan Rekomendasi Berdasarkan Hasil Rumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif

BAGAN ALIR KLHS DALAM TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD



SELANJUTNYA.....



**MODUL
TAHAP PERSIAPAN KLHS**



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

MODUL - 2
TAHAP PERSIAPAN KLHS

Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah

PELATIHAN KLHS RPJMD
Jogjakarta, 22 – 24 MARET 2016



1 | Persiapan



2 | Melakukan Pra Pelingkupan

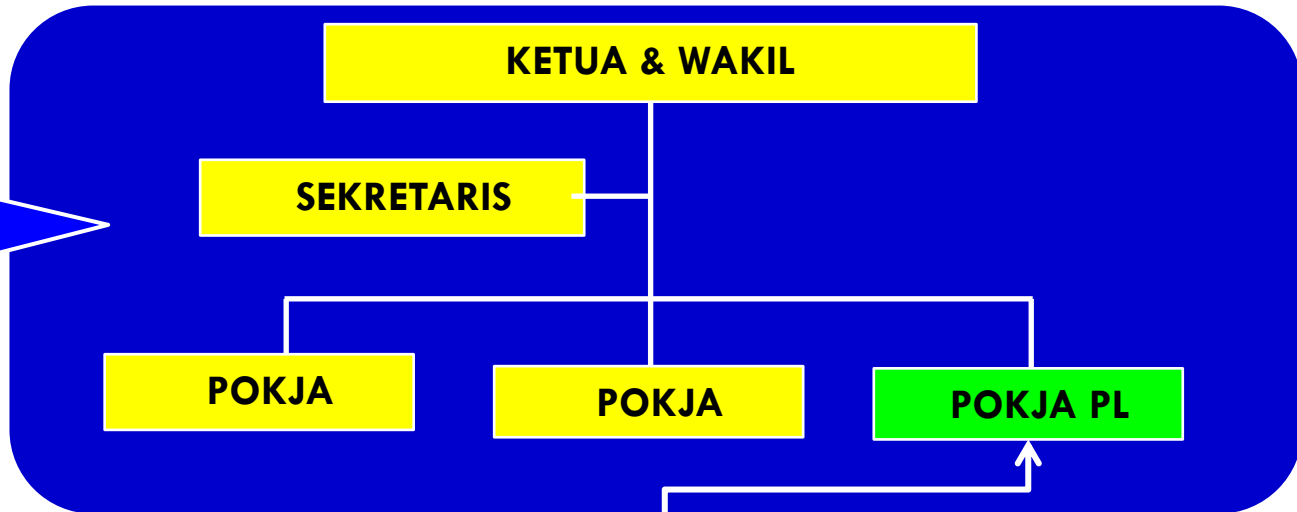
3 | Memetakan Pemangku Kepentingan

MATERI 1

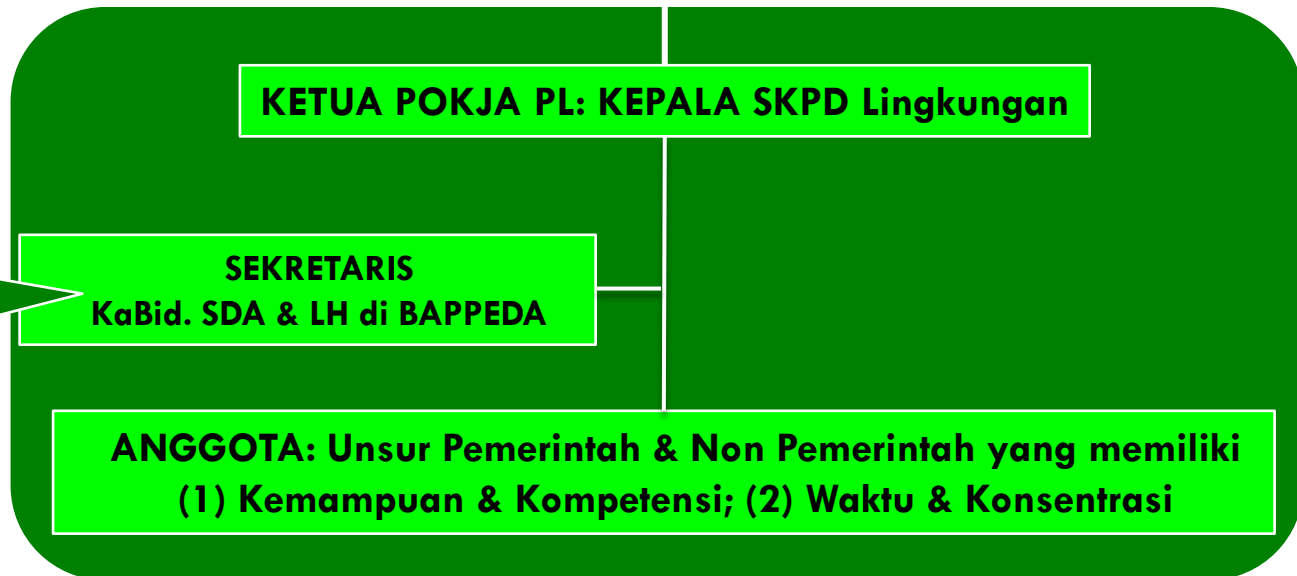
MELAKUKAN PERSIAPAN



PERMENDAGRI NO. 54/2010
Tim Penyusun RPJPD/RPJMD



PERMENDAGRI NO. 67/2012
Pokja Pengendalian Lingkungan (KLHS)



Membentuk POKJA Pengendalian Lingkungan



Permendagri No. 54/2010:

1. Pembentukan Tim Penyusun RPJPD/RPJMD dengan Surat Keputusan
2. Tim Penyusun terdiri sejumlah Pokja sesuai urusan pemerintahan

Permendagri No. 67/2012:

1. Untuk pelaksanaan KLHS perlu pembentukan Pokja Pengendalian Lingkungan (Pokja PL)
2. Pokja PL merupakan satu kesatuan dengan Tim Penyusun RPJPD/RPJMD dan wajib bekerjasama dengan Pokja lain dengan koordinasi Ketua Tim Penyusun RPJPD/RPJMD.
3. Pokja PL diketuai oleh Kepala SKPD Lingkungan dan Ka.Bid SDA & LH di Bappeda sebagai Sekretaris
4. Anggota Pokja PL meliputi pejabat dan staf SKPD dan unsur di luar pemerintahan yang memiliki:
 - Kemampuan & kompetensi dalam perencanaan dan pembangunan berkelanjutan
 - Waktu dan konsentrasi untuk melaksanakan KLHS

Syarat Keberhasilan Pokja PL



- Perlu adanya **TIM INTI** (6 s/d 15 orang) dalam POKJA PL
- Perlu anggota POKJA PL yang memiliki akses data spasial dan dapat mengoperasikan **Sistem Informasi Geografis (SIG)**
- Perlu anggota dari **unsur non-pemerintah**
- Media komunikasi bersama (Media Sosial)



CONTOH OUTLINE KAK KLHS

1. Latar Belakang
2. Tujuan dan Sasaran KLHS
3. Lingkup Kegiatan
4. Hasil yang Diharapkan
5. Rencana Kerja Pelaksanaan dan Metode Pengkajian
6. Tenaga Ahli yang Diperlukan
7. Pendanaan
8. Kerangka Waktu



TA YANG TERSEDIA DI DAERAH

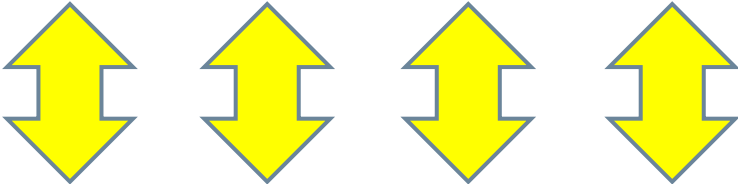
- Perguruan Tinggi
- LSM
- Profesional
- Bidang keahlian sesuai dengan isu utama

Tenaga ahli berperan sebagai narasumber, fasilitator, motivator, pendamping dan sekaligus konsultan bagi anggota Tim.

Rencana Kerja



Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 4	Bulan 6
		Rancangan Awal RPJMD			Perda RPJMD



Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4
			Pengintegrasian KLHS



MATERI 2

MELAKUKAN PRA PELINGKUPAN

TUJUAN PRA-PELINGKUPAN

- Mengidentifikasi isu-isu penting yang akan dipertimbangkan dalam proses KLHS
- Mengidentifikasi pemangku kepentingan yang akan terlibat dalam proses KLHS
- Mengidentifikasi baseline data dan kemungkinan-kemungkinan pilihan alternatif KRP
- Menentukan batasan RUANG dan WAKTU dari KLHS
- Mengidentifikasi faktor pendorong beserta perkiraan dampaknya dan muatan KLHS yang harus dilakukan

Melakukan Pra Pelingkupan



Pembentukan
Forum
Pemangku
Kepentingan

6

Menyusun laporan pra-pelingkupan sbg bahan pelingkupan

5

Mengidentifikasi Pemangku Kepentingan Terkait

4

Mengevaluasi isu-isu strategis berdasarkan kriteria, perkiraan lokasi, jenis dan sumber data/informasi

3

Mengelompokkan & menggabungkan isu-isu atas kesamaan substansi

2

Mengidentifikasi isu-isu pembangunan berkelanjutan

1

Pokja PL melaksanakan FGD bersama Tim Penyusun RPJMD



Desk study terkait isu-isu pembangunan berkelanjutan (lingkungan, sosial budaya dan ekonomi) melalui cara sbb:

- ▶ Penelaahan RPJPN, RPJPD/RPJMD, RPJPD/RPJMD daerah tetangga, RTRWN, RTR Pulau;
- ▶ Penelaahan kebijakan, rencana dan program di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi; misalnya: Renstra Kementerian
- ▶ Penelaahan dokumen hasil kajian yang sudah ada; misalnya: Profil Kesehatan Daerah, Rakesda, Analisis ekonomi daerah, SLHD, Kabupaten dalam angka dsb.
- ▶ *Internet Browsing (Internet Search)*

Curah pendapat isu-isu diantara anggota dengan cara:

- ▶ *Metaplan Process dan Mind Mapping*

Mind Mapping Faktor Pendorong Terjadinya Isu-isu Strategis



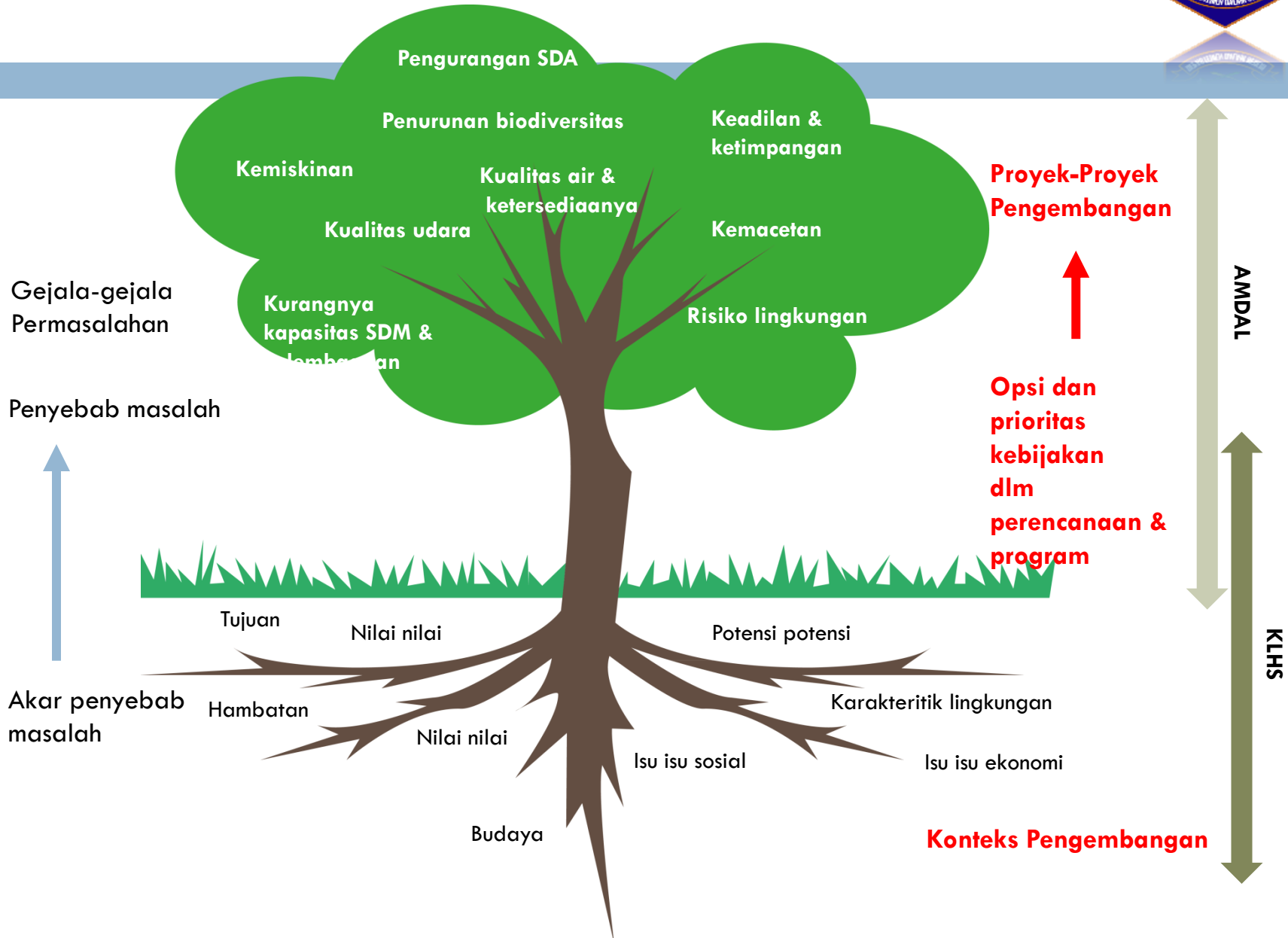
Identifikasi hingga menemukan akar penyebabnya



Contoh Mind Mapping



Pohon Permasalahan



Contoh Pengelompokan Isu Menurut Aspek Pembangunan Berkelanjutan KAB INDRAGIRI HIJAU 2013



TEMA	ISU STRATEGIS
LINGKUNGAN HIDUP	1. Kerusakan Daerah Aliran Sungai dan Tingginya Alih Fungsi Lahan
	2. Degradasi Kawasan Pesisir
	3. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
EKONOMI	4. Kesenjangan Ekonomi dan Infrastruktur penunjang antar kawasan
	5. Rendahnya Daya Saing Daerah di Sektor Pertanian
SOSIAL	6. Rendahnya Kualitas Pendidikan
	7. Tingginya Tingkat Kerawanan Sosial
	8. Rendahnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
TATA KELOLA	9. Belum Optimalnya Penerapan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Contoh Pengelompokan Isu

Menurut Komponen Lingkungan Hidup

KAB TAPANULI UTARA 2015



**RANCANGAN
RPJMD
PROVINSI/
KABUPATEN/
KOTA**



□ FISIK-KIMIA

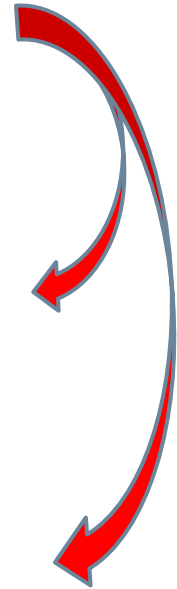
1. Udara/Iklim – Taput Semakin Panas
2. Air – Kualitas & Kuantitas Air Menurun
3. Tanah/Lahan – Lahan Kritis Meningkat

□ EKOSISTEM

4. Degradasi & Fragmentasi Hutan
5. Degradasi Kawasan Danau Toba
6. Kemerosotan Keanekaragaman Hayati

□ SOSEKBUD

7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah
8. Kesejahteraan Masyarakat
9. Kesehatan Masyarakat
10. Budaya dan Kearifan Lokal
11. Konflik Sosial



Contoh Kriteria untuk Menentukan Isu Strategis



- Isu memiliki dampak turunan apabila tidak ditangani dengan benar
- Isu bersifat lintas batas wilayah administrasi
- Isu memiliki dampak kumulatif apabila tidak ditangani dengan benar
- Isu bersifat lintas sektoral – hanya dapat ditangani secara lintas sektoral

Contoh Hasil Pra Pelingkupan



NO	ISU STRATEGIS	LOKASI	SUMBER & PEMILIK DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	<p>Tapanuli Utara semakin panas Faktor Penyebab:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emisi GRK yang meningkat akibat kerusakan hutan dan lainnya <p>Akibat yang Ditimbulkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perubahan musim tanam • Produktivitas menurun 	<p>Tarutung, Pahae Julu Parmonagan, Sipaholo, Pangaibuan, Muara dan Garoga</p>	<p>Dishut, LH Taput & YEL</p>	<p>Dharma P Simanungkalit, Burhan</p>
2.	<p>Menurunnya kualitas dan kuantitas air Faktor Penyebab:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Degradasi hutan akibat dari penebangan hutan dan alih fungsi lahan • Semakin meningkatnya kegiatan galian C • Pencemaran dari industri, rumah tangga, rumah sakit, jasa automotif, dan TPS/TPA • Limbah saprodi pertanian dan perkebunan (penggunaan pestisida/pupuk kimiaberlebih), KJA (Keramba Jaring Apung) • Kesadaran masyarakat dan penegakan hukum belum memadai <p>Akibat yang Ditimbulkan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memunculkan biayatambahan untuk membeli air minum • Menurunnya opulasiikan Garing (Ihan) • Minimbulkan penyakit pada manusia (diaredankulit/gatal-gatal) 	<p>Simangumban, Muara, Adiankoting, Pahae Jae, Pahae Julu, Tarutung, Parmonangan, Pagaran</p>	<p>KLH Taput, Dishut, BP4K, Distanbun,</p>	<p>Frans Harahap, Dharma</p>

Contoh Hasil Pra Pelingkupan

NO	ISU STRATEGIS	LOKASI	SUMBER & PEMILIK DATA	PENANGGUNG JAWAB
3.	<p>Besarnya area lahan kritis</p> <p><i>Faktor Penyebab</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara topografi berbukit dan bergelombang • Secara geologis struktur dan tekstur tanah yang labil • Pola peladangan yang berpindah-pindah • Penggunaan pupuk kimia berlebih dalam waktu lama • Kurangnya kesadaran masyarakat dalam penanaman pohon <p><i>Akibat yang Ditimbulkan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Berkurangnya sumber kehidupan masyarakat sekitar • Meningkatkan potensi bencana (longsor, banjir) • Tingginya tingkat kekeruhan air permukaan dan sedimentasi • Berkurangnya sumber air • Banyaknya lahan yang tidak produktif 	15 Kecamatan	Dishut, BPBD, BAPPEDA, Distanbun, BP4K	Dharma P Skalit, Erlinda, Rambe Hutabarat
4.	<p>Penurunan ekosisten hutan</p> <p><i>Faktor Penyebab</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penebangan hutan • Pembukaan lahan untuk pertanian (penggarapan) • Perambahan hutan • Kebakaran hutan • Belum adanya tapal batas • Tumpang tindih kepemilikan <p><i>Akibat yang Ditimbulkan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sumber mata air berkurang • Sumber pendapatan bagi masyarakat berkurang • Menurunnya produksi oksigen • Menurunnya keanekaragaman hayati 	15 Kecamatan	Dishut, KLH, PDAM, Yel	Dharma PS Kalit, Panggabean, Burhan
5.	Dst....			

Contoh Daftar Isi Laporan Pra Pelingkupan



KATA PENGANTAR	
DAFTAR AKRONIM DAN SINGKATAN	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB 1	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Tujuan KLHS
1.3	Kegiatan dan Metodologi Pra Pelingkupan
BAB 2	PROFIL WILAYAH KAJIAN
2.1	Profil Modal Alami
2.2	Profil Modal Ekonomi
2.3	Profil Modal Sosial Budaya
BAB 3	IDENTIFIKASI KEBIJAKAN, RENCANA, DAN PROGRAM
3.1	Ringkasan Rancangan RPJMD
3.2	KRP di Luar RPJMD
BAB 4	HASIL PRA PELINGKUPAN
4.1	Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan
4.2	Baseline Data Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan
BAB 5	POTENSI DAMPAK LINGKUNGAN SEMENTARA
BAB 6	LANGKAH TINDAK LANJUT
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

MATERI 3

PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN



Persiapan



Workshop Pelingkupan (Verifikasi dan Klarifikasi Hasil Pra Pelingkupan)



FGD Lanjutan & Kerja Tim Teknis (Analisis Baseline, Kajian Pengaruh)



Workshop Perumusan Mitigasi dan Alternatif



Workshop Perumusan Rekomendasi



Mengintegrasikan hasil pengambilan keputusan Kepala Daerah ke dalam Draft raperda RTRW, RPJP, RPJM

**PEMANGKU
KEPENTINGAN**





Pendekatan Pelaksanaan KLHS

**Teknokratik-
Birokratik**

Menggunakan metodologi analisis ilmiah & dapat dipertanggungjawabkan secara birokrasi

+

Partisipatif

Melibatkan pemangku kepentingan terkait

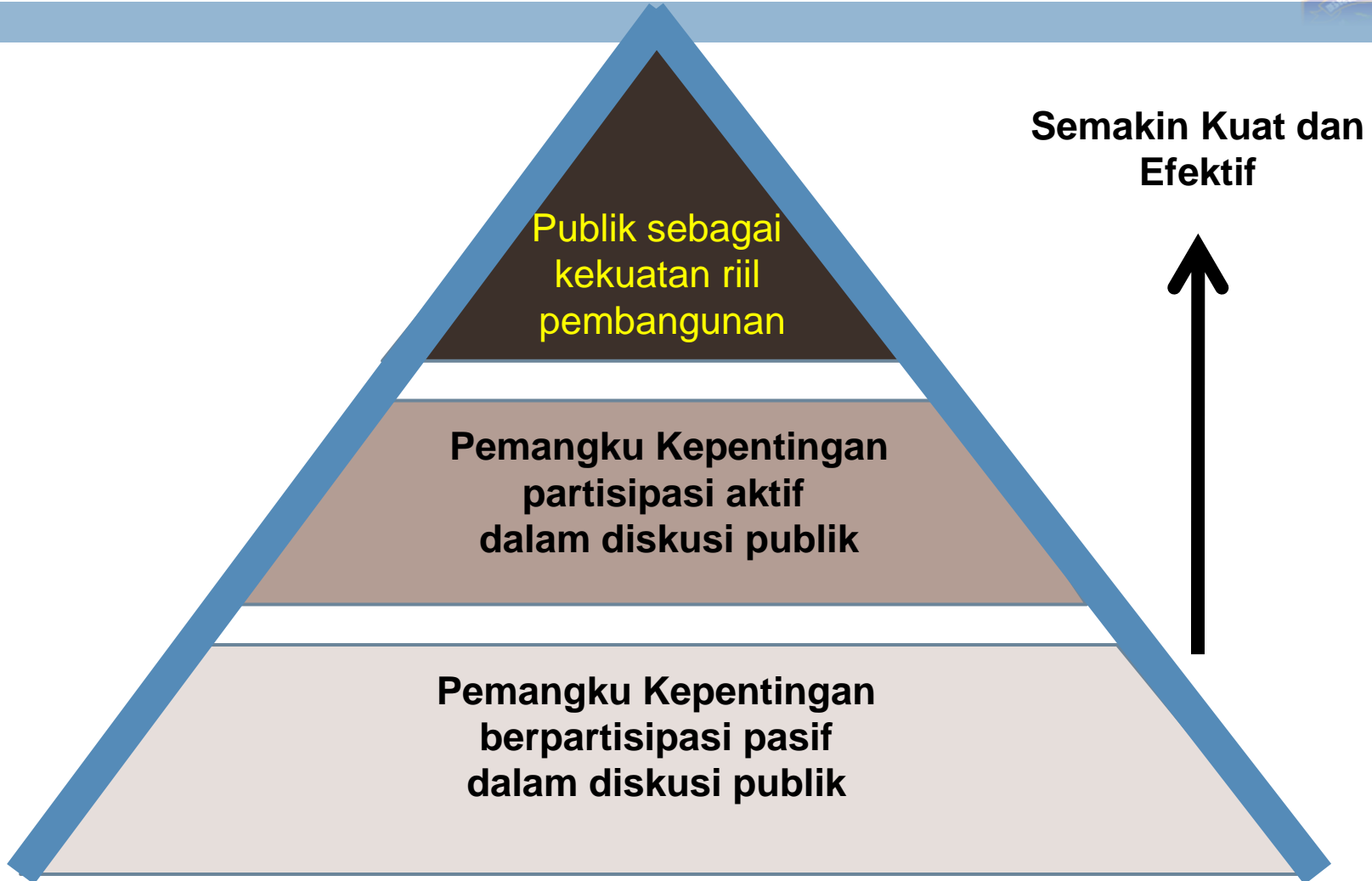
=

Deliberatif

Perpaduan antara Teknokratik-Birokratik dan Partisipatif



Tingkat Partisipasi Pemangku Kepentingan



Sumber: Arnstein, 1969



Metode

- ▶ Bahan-bahan Cetak (*Disclosure & Printed Materials*)
- ▶ Poster & Brosur (*Displays & Exhibitions*)
- ▶ Hotline Informasi
- ▶ Kuesioner dan Survei
- ▶ Wawancara Langsung (konsultasi terstruktur melalui pertemuan individu, telepon atau email)
- ▶ Konsultasi Berbasis Internet
- ▶ Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion*)
- ▶ Temu Publik (*Public Hearings*)
- ▶ Lokakarya (*Problem-solving Workshops*)
- ▶ Perundingan
- ▶ Tim/Panitia/Badan Penasehat



Manfaat Partisipasi Pemangku Kepentingan

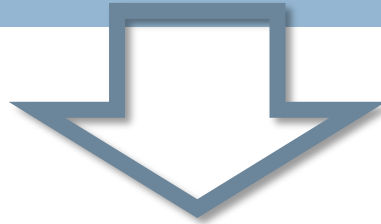


Contoh Instrumen Identifikasi Pemangku Kepentingan



PEMANGKU KEPENTINGAN	YANG MEMPENGARUHI PENYUSUNAN RTRW	YANG DIPENGARUHI PELAKSANAAN RTRW
Pemerintah	1.	
	2.	
	3.	
	dst.	
LSM/Ormas	1.	
	2.	
	dst.	
Perguruan Tinggi/Akademisi	1.	
	2.	
	dst.	
Dunia Usaha	1.	
	2.	
	dst.	
Tokoh Masyarakat	1.	
	2.	
Lainnya		

SELANJUTNYA.....



**MODUL
TAHAP PELINGKUPAN
KLHS**



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

MODUL 3
TAHAP PELINGKUPAN

Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah

PELATIHAN KLHS RPJMD
Jogjakarta, 22 – 24 MARET 2016

Tujuan Pelingkupan

- a) **Memverifikasi dan Mengklarifikasi hasil Pra Pelingkupan kepada pemangku kepentingan**
- b) **Menyepakati isu-isu strategis KLHS RPJMD bersama pemangku kepentingan**
- c) **Menyampaikan hasil kesepakatan isu strategis kepada Pokja Penyusun RPJMD untuk diintegrasikan ke dalam isu-isu strategis RPJMD**
- d) **Mengidentifikasi faktor pendorong dan perkiraan dampaknya**
- e) **Mengidentifikasi lingkup WILAYAH dengan peta**
- f) **Mengidentifikasi data baseline, beserta penanggung jawab wali data**

Tahap Pelingkupan



Dapat menggunakan tabel

5

Menyusun laporan pelingkupan sbg bahan pengkajian

4

Menyepakati isu strategis & isu terkait berdasarkan kriteria

3

Mengelompokkan ulang isu-isu apabila diperlukan

2

Menambahkan/mengurangi isu-isu dan data/informasi

1

Memaparkan hasil pra pelingkupan kepada pemangku kepentingan



1 | Workshop Pemaparan Hasil Pra-Pelingkupan

- ▶ Pelingkupan → Workshop → Melibatkan pemangku kepentingan
- ▶ Tim KLHS → Memaparkan hasil pra-pelingkupan

FASILITATOR

- ▶ Memfasilitasi diskusi, memberi catatan, memberi pengetahuan baru
- ▶ Memastikan validitas setiap isu dan informasinya, sebab/akibat, perkiraan dampak, perkiraan lokasi terdampak dan sumber data/informasi



2 & 3

Menambah/Mengurangi dan Mengelompokkan Isu

- ▶ Fasilitator bersama pemangku kepentingan membahas validitas hasil pra-pelingkupan
- ▶ Menambahkan isu yang belum ada atau menghapus isu yang tidak valid
- ▶ Jika perlu, melakukan pengelompokkan isu dan menambahkan informasi penting lainnya



4 | Menyepakati Isu Strategis

- ▶ Isu diuji apakah sudah memenuhi kriteria strategis
- ▶ Kesepakatan dilakukan secara musyawarah dan difasilitasi oleh fasilitator.
- ▶ Menambahkan informasi penting:
 - Identifikasi wilayah/lokasi yang diperkirakan terdampak dengan peta
 - Identifikasi kebutuhan data (jenis & sumber) dan narasumber yang dapat diandalkan

**DAFTAR ISU-ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN HASIL KLARIFIKASI/VERIFIKASI
KLHS RPJMD PROVINSI BANGKA BELITUNG**

NO	TEMA ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	ISU-ISU TERKAIT	URAIAN KLARIFIKASI/VERIFIKASI ISU-ISU TERKAIT	LOKASI	SUMBER DATA
1	SUMBER DAYA AIR	Meningkatnya pencemaran air sungai	Peningkatan kekeruhan dan sedimentasi di hampir seluruh sungai serta peningkatan logam berat khusus di daerah perkotaan	Sungai Rangkui, Sungai Pedindang (Pangkalpinang), sungai babi, sungai tanjung, sungai mengkiong, Bangka Barat, dsb	data SLHD (status lingkungan hidup daerah) tahun 2009-2011
			Kekeruhan dan sedimentasi disebabkan karena adanya aktivitas penambangan di hulu sungai dan DAS		
		Penurunan kualitas dan kuantitas sumber air baku	Penurunan kualitas terlihat dari meningkatnya nilai TSS, TDS, DO, bakteri ecoli dan menurunnya pH, COD	Sungai Pedindang, Kolong Bacang, Kolong Menjelang, Kolong Fishfarm (Koba), Sungai Babi, Kolong Merawang, Kolong Minyak (Beltim)	data BLHD, SLHD, PDAM Kab/Kota, BPDAS Batu Rusa Cerucuk, PU, BPS
			Penurunan kuantitas air baku disebabkan rusaknya catchment area dan kawasan lindung sekitar sumber air baku		
			Penurunan kuantitas terjadi sepanjang waktu tidak hanya pada musim kemarau.		
		Penurunan kualitas pesisir	Terjadinya kerusakan kualitas pesisir disebabkan adanya akumulasi dari kegiatan kapal isap yang membuang tailing secara langsung ke permukaan laut sehingga menyebabkan peningkatan kekeruhan dan sedimentasi	Penganak, Juku, Belo Laut, Teluk Rubia, Permis, Tanjung Gunung, Sampur, Pantai Rebo	
			Terjadinya kerusakan pesisir disebabkan adanya aktivitas TI apung dan sedimentasi sungai		
		Penurunan muka air tanah	Sumber air tanah makin dalam.	Kawasan perkotaan dan industri se-Babel	
			Belum ada data tentang ketinggian muka air tanah		
		Kekeringan pada musim kemarau	Kurangnya air bersih untuk rumah tangga di daerah perkotaan	wilayah dataran tinggi Pangkalpinang	
Genangan air pada saat hujan dan pasang tinggi yg terjadi secara bersamaan	Pada saat hujan di beberapa tempat terjadi genangan air di kawasan perkotaan	Pangkalpinang, Sungai Liat			
	Pasang tinggi terjadi pada periode tertentu				

**Contoh
Tabel
Konsultasi
Publik**

**KLHS RPJMD
Prov. Bangka
Belitung, 2012**



Contoh Tabel Konsultasi dengan Pemangku Kepentingan KLHS RTRW KABUPATEN TAPANULI UTARA 2015

NO	ISU STRATEGIS	ISU TERKAIT	LOKASI	SUMBER/PEMILIK DATA+INFORMASI
1.	Penurunan ekosisten hutan	<p><i>Faktor Penyebab</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Penebangan hutan• Pembukaan lahan untuk pertanian (penggarapan)• Perambahan hutan• Kebakaran hutan• Belum adanya tapal batas• Tumpang tindih kepemilikan <p><i>Akibat yang Ditimbulkan</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Sumber mata air berkurang• Sumber pendapatan bagi masyarakat berkurang• Menurunnya produksi oksigen• Menurunnya keanekaragamanhayati	15 Kecamatan	Dishut, KLH, PDAM, YEL
CATATAN (MASUKAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN)		<ul style="list-style-type: none">- <i>Alihfungsi lahan</i>- <i>Lemahnya penegakan hukum adat</i>- <i>Konsesi Perusahaan</i>- <i>Kurangnya perawatan terhadap kayu di tanah krisis yg telah direboisasi atau minimnya usaha reboisasi</i>	15 Kecamatan	AMAN



Contoh Tabel Konsultasi dengan Pemangku Kepentingan KLHS RTRW KABUPATEN TAPANULI UTARA 2015

NO	ISU STRATEGIS	ISU TERKAIT	LOKASI	SUMBER DATA+INFO
2.	Menurunnya kualitas dan kuantitas air	<p>Faktor Penyebab</p> <ul style="list-style-type: none"> • Degradasi hutan akibat dari penebangan hutan dan alih fungsi lahan • Semakin meningkatnya kegiatan galian C • Pencemaran dari industri, rumah tangga, rumah sakit, jasa automotif, dan TPS/TPA • Limbah saprodi pertanian dan perkebunan (penggunaan pestisida/pupuk kimiaberlebih), KJA (Keramba Jaring Apung) • Kesadaran masyarakat dan penegakan hukum belum memadai <p>Akibat yang Ditimbulkan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memunculkan biayatambahan untuk membeli air minum • Menurunnya opulasiikan Garing (Ihan) • Minimbulkan penyakit pada manusia (diaredankulit/gatal-gatal) 	Simangumban, Muara, Adiankoting, Pahae Jae, Pahae Julu, Tarutung, Parmonangan, Pagaran	KLH Taput, Dishut, BP4K, Distanbun,
CATATAN (MASUKAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN)		<p>Factor penyebab :</p> <ul style="list-style-type: none"> • karena kurangnya perawatan pada sumber mata air • Tidak ada perawatan pada lokasi sumber mata air <p>Akibatnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SupPenurunan kuantitas sumber mata air • lai air bersih kemasyarakat berkurang <p>Faktor penyebab :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pematangan Lahan yang kurang optimal di proyek perusahaan swasta <p>Akibatnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penurunan kualitas air permukaan akibat erosi tanah <p>Penyebab :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemakaian Tuba Mas untuk penangkapan ikan <p>Akibatnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Punahnya ikan jurung pada sungai dan danau 	<p>Sumber mata air : Ugan & Sitakka</p> <p>Kecamatan: Pahae Jae dan Pahae Julu</p> <p>Kecamatan Pahae Jae</p>	<p>Tokoh masyarakat : B. Sinaga</p> <p>Perusahaan swasta</p> <p>Camat Pahae Jae</p>



Contoh Tabel Konsultasi dengan Pemangku Kepentingan KLHS RTRW KABUPATEN TAPANULI UTARA 2015

NO	ISU STRATEGIS	ISU TERKAIT	LOKASI	SUMBER DATA+INFO
3.	Besarnya area lahan kritis	<p>Faktor Penyebab</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara topografi berbukit dan bergelombang • Secara geologis struktur dan tekstur tanah yang labil • Pola peladangan yang berpindah-pindah • Penggunaan pupuk kimia berlebih dalam waktu lama • Kurangnya kesadaran masyarakat dalam penanaman pohon <p>Akibat yang Ditimbulkan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berkurangnya sumber kehidupan masyarakat sekitar • Meningkatkan potensi bencana (longsor, banjir) • Tingginya tingkat kekeruhan air permukaan dan sedimentasi • Berkurangnya sumber air • Banyaknya lahan yang tidak produktif 	15 Kecamatan	Dishut, BPBD, BAPPEDA, Distanbun, BP4K
<p>CATATAN (MASUKAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN)</p>		<p>Penyebab :</p> <ul style="list-style-type: none"> • penggalian tanah pada proyek <p>Akibat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tanah galian masuk ke galian irigasi • terjadinya timbunan tanah pada persawahan • gagal panen 	Kecamatan Pahae Jae	Camat Pahae Jae



Contoh HASIL Konsultasi dengan Pemangku Kepentingan KLHS RTRW KABUPATEN TAPANULI UTARA 2015

NO	TEMA/ KELOMPOK ISU	ISU KUNCI	MASUKAN STAKEHOLDER	FAKTOR PENYEBAB	LOKASI	DATA
1.	Sumber Daya Air	Meningkatnya pencemaran air sungai	Peningkatan kekeruhan dan sedimentasi di hampir seluruh sungai serta peningkatan logam berat khusus di daerah perkotaan	Kekeruhan & sedimentasi disebabkan karena adanya aktivitas penambangan di hulu sungai & DAS	S. Rangkui, S. Pedindang (Pangkalpinang), S. Babi, S. Tanjung, S. Mengkiang, S. Bangka Barat, dsb.	SLHD 2009-2011
		Penurunan kualitas & kuantitas sumber air baku	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan kualitas terlihat dari meningkatnya nilai TSS, TDS, DO, bakteri ecoli, & menurunnya pH & COD • Penurunan kuantitas terjadi sepanjang tahun, tidak hanya pada musim kemarau 	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan kualitas air baku disebabkan oleh terutama aktivitas tambang & domestik • Penurunan kuantitas air baku disebabkan oleh rusaknya cathment area & kawasan lindung sekitar sumber air baku 	S. Pedindang, Kolong S. Babi, Kolong Merawang, Bacang, Kolong Menjelang, Kolong Fishfarm (Koba), Kolong Minyak (Beltim)	SLHD, PDAM Kab/Kota, BPDAS Batu Rusa Cerucuk, PU, BPS
		Penurunan kualitas pesisir	Penurunan kualitas pesisir terutama dalam hal meningkatnya kekeruhan dan sedimentasi sungai dan pesisir	<ul style="list-style-type: none"> • Akumulasi kegiatan kapal isap yg membuang tailing scr langsung ke permukaan laur sehingga menyebabkan peningkatan kekeruhan & sedimentasi • Aktivitas TI apung & sedimentasi sungai 	Penganak, Juku, Belo Laut, Teluk Rubia, Permis, Tanjung Gunung, Sampur, Pantai Rebo	DKP Prov & Kab/Kota
		Penurunan muka air tanah				
		Dst.				



ANALISIS BASELINE DATA



ANALISIS BASELINE DATA

TUJUAN

Memberikan **gambaran**:

- Posisi masa lalu dan terkini isu-isu strategis
- Profil wilayah masa lalu dan terkini
- Pola kecenderungan isu-isu strategis KLHS
- Faktor pendorong terjadinya isu KLHS

FUNGSI

Sebagai informasi awal untuk digunakan dalam proses pengkajian

DATA & INFORMASI

- Data sosial
- Data fisik alami
- Data ekonomi
- Data wilayah (spasial/ruang)

SUMBER

- Data dan informasi instansional (daerah dan pusat) yang telah dimiliki Tim Penyusun RPJPD
- Dokumen perencanaan terkait
- Hasil-hasil studi/kajian tematik yang telah ada

Langkah-langkah untuk Analisis Kecenderungan:

5

Menyajikan hasil analisis kecenderungan di dalam Laporan Pelingkupan

4

Memperbaiki analisis kecenderungan berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan

3

Melakukan pemeriksaan (verifikasi) data time series bersama pemangku kepentingan

2

Melakukan analisis kecenderungan dengan berbagai macam pilihan metode dan teknik analisis

1

Mengumpulkan data time series untuk menganalisis kecenderungan isu-isu strategis tertentu pada lokasi tertentu baik data tabel maupun spasial


DATA



- Diperlukan **data berseri** minimal 10 tahun terakhir atau yang terbaik yang tersedia
- Data tidak hanya data numerik namun juga data spasial (peta-peta) terutama perencanaan (RTRW)
- Diperlukan adanya komitmen bersama antara Pokja PL dengan Perangkat Daerah untuk berbagi data
- Kemampuan Pokja PL untuk berkomunikasi dengan sumber data lain di luar perangkat daerah, mis: Pemerintah, NGO, Komunitas dan universitas

ANALISIS



- 
- Menentukan posisi awal (*benchmarking*) berdasarkan data dan informasi yang tersedia
 - Melakukan analisis kecenderungan dengan berbagai macam metode dan teknik yang dikuasai oleh Pokja PL dan TA
 - Melakukan analisis spasial jika memungkinkan dilakukan
 - Mengidentifikasi faktor-faktor pendorong terjadinya kecenderungan yang terjadi dengan menggunakan *Mind Mapping*



Contoh Teknik Analisis:

1

Olah tabulasi data secara komputerisasi

- ▶ Menggunakan modeling numerik untuk analisis tertentu
- ▶ Menggunakan program pengelolaan data untuk analisis parameter jamak

2

Pemanfaatan Analisis Spasial Berbasis SIG

- ▶ Menampilkan fakta wilayah
- ▶ Menyajikan informasi dalam bentuk titik (point), garis (line) dan area (polygon)
- ▶ Mengintegrasikan tematik informasi spasial dengan metode superimposed
- ▶ Membuat modelling spasial untuk analisis kecenderungan
- ▶ Dengan modelling dibuat simulasi perubahan suatu tematik

Contoh Hasil Analisis Kecenderungan:

Isu Strategis & Isu Terkait	Baseline Data
<p data-bbox="28 275 797 318">2. Menurunnya kualitas dan kuantitas air</p> <p data-bbox="28 354 353 396"><i>Faktor Penyebab</i></p> <ul data-bbox="54 415 1209 1039" style="list-style-type: none">• Degradasi hutan akibat dari penebangan hutan dan alih fungsi lahan• Semakin meningkatnya kegiatan galian C di DAS• Pencemaran dari industri, rumah tangga, rumah sakit, jasa automotif, dan TPS/TPA• Limbah saprodi pertanian dan perkebunan (penggunaan pestisida/pupuk kimia berlebih), KJA (Keramba Jaring Apung)• Kesadaran masyarakat dan penegakan hukum belum memadai• Kurangnya perawatan sumber-sumber mata air <p data-bbox="28 1072 504 1115"><i>Akibat yang Ditimbulkan</i></p> <ul data-bbox="54 1133 1209 1339" style="list-style-type: none">• Memunculkan biaya tambahan untuk membeli air bersih• Menurunnya populasi Ikan Garing (Ihan)• Meningkatnya prevelensi penyakit yang disebabkan oleh air seperti diare dan penyakit kulit	<ul data-bbox="1261 272 1928 1372" style="list-style-type: none">• Secara kualitatif dirasakan• laju deforestasi 1990-2000: 0,15% (285 ha) per tahun; 2010-2013: 0,17% (323 Ha) per tahun• 15 perusahaan galian C• nilai DO (oksigen terlarut dalam air) di Aek Sigaeon dan Aek Situmandi telah melewati ambang batas• KJA seluas 64 hektar yang dimiliki oleh 43 orang petani maksimum, melebihi batas maksimum 16 Ha• Dari 21 jenis penyakit 5% kasus diare dan 1,6% kasus penyakit kulit

Isu Strategis & Isu Terkait

Baseline Data

7. Rendahnya laju pendapatan perkapita pertahun

Faktor Penyebab

- Rendahnya investasi akibat minimnya infrastruktur, penerbitan izin, dll.
- Tidak stabilnya harga komoditas utama perkebunan
- Rendahnya pendapatan dari sektor-sektor unggulan
- Luasnya lahan tidak produktif

Akibat yang Ditimbulkan

- Memicu terjadinya urbanisasi
- Laju pembangunan daerah lambat

- pertumbuhan rata-rata ekonomi selama 2009-2013 sebesar 5.61%, di bawah Provinsi Sumatera Utara (6.07%) dan nasional (5,97%).
- pertumbuhan sektor pertanian (4,04%) dan keuangan, persewaan & jasa perusahaan (4,53%) di bawah rata2 (5,61%)
- area kritis seluas 44.393 Ha di 2013 bertambah menjadi 44.673 Ha di 2014

Isu Strategis & Isu Terkait

Baseline Data

10. Lunturnya nilai budaya dan kearifan lokal

Faktor Penyebab

- Lunturnya budaya gotong-royong dalam masyarakat (marsiadapari)
- Rasa memiliki yang hilang dari masyarakat
- Hedonisme akibat masuknya budaya asing/modernisme melalui penggunaan internet dan media sosial yang tidak bertanggung jawab
- Belum tersedianya wadah untuk menampung kreativitas generasi muda
- Tidak adanya regenerasi kebudayaan (*generation gap*)

Akibat yang Ditimbulkan

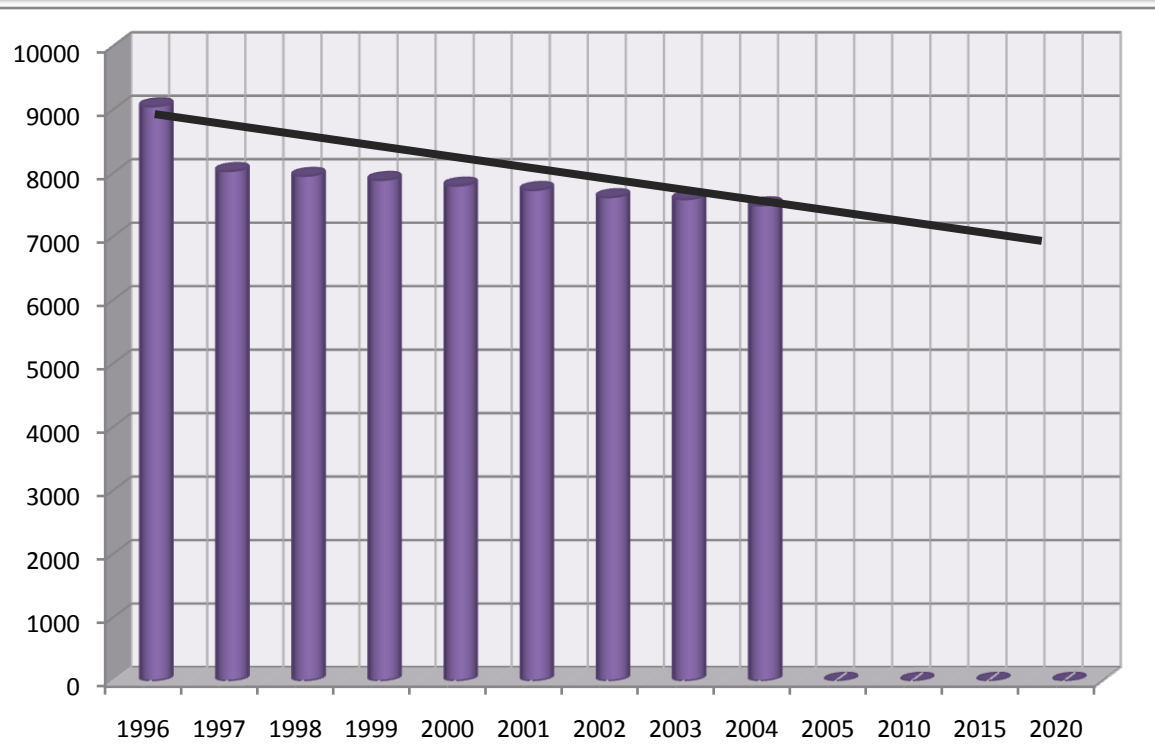
- Munculnya kenakalan remaja
- Konflik sosial-budaya
- Mulai ditinggalkannya kegiatan ibadah
- Munculnya KDRT
- Munculnya kriminalitas

- Tidak tersedia data tertulis tetapi dirasakan oleh para pemangku kepentingan

Contoh Hasil Analisis Kecenderungan:

ANALISIS KECENDERUNGAN

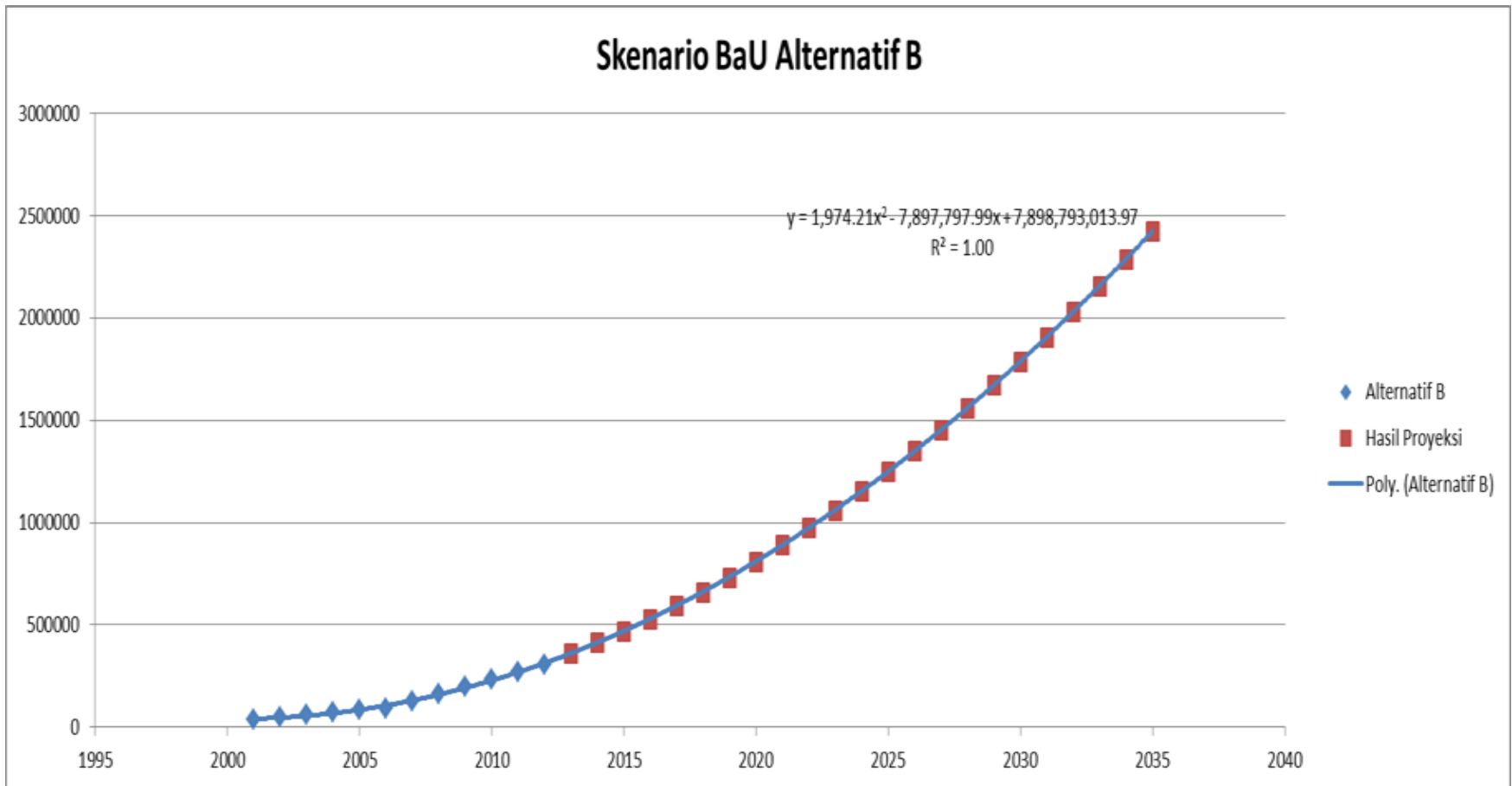
- ▶ Analisis kecenderungan (tren) dari sekumpulan data *time series*
- ▶ Analisis ini dilakukan untuk mengetahui perkiraan kecenderungan kondisi lingkungan
- ▶ Metode disesuaikan dengan kemampuan



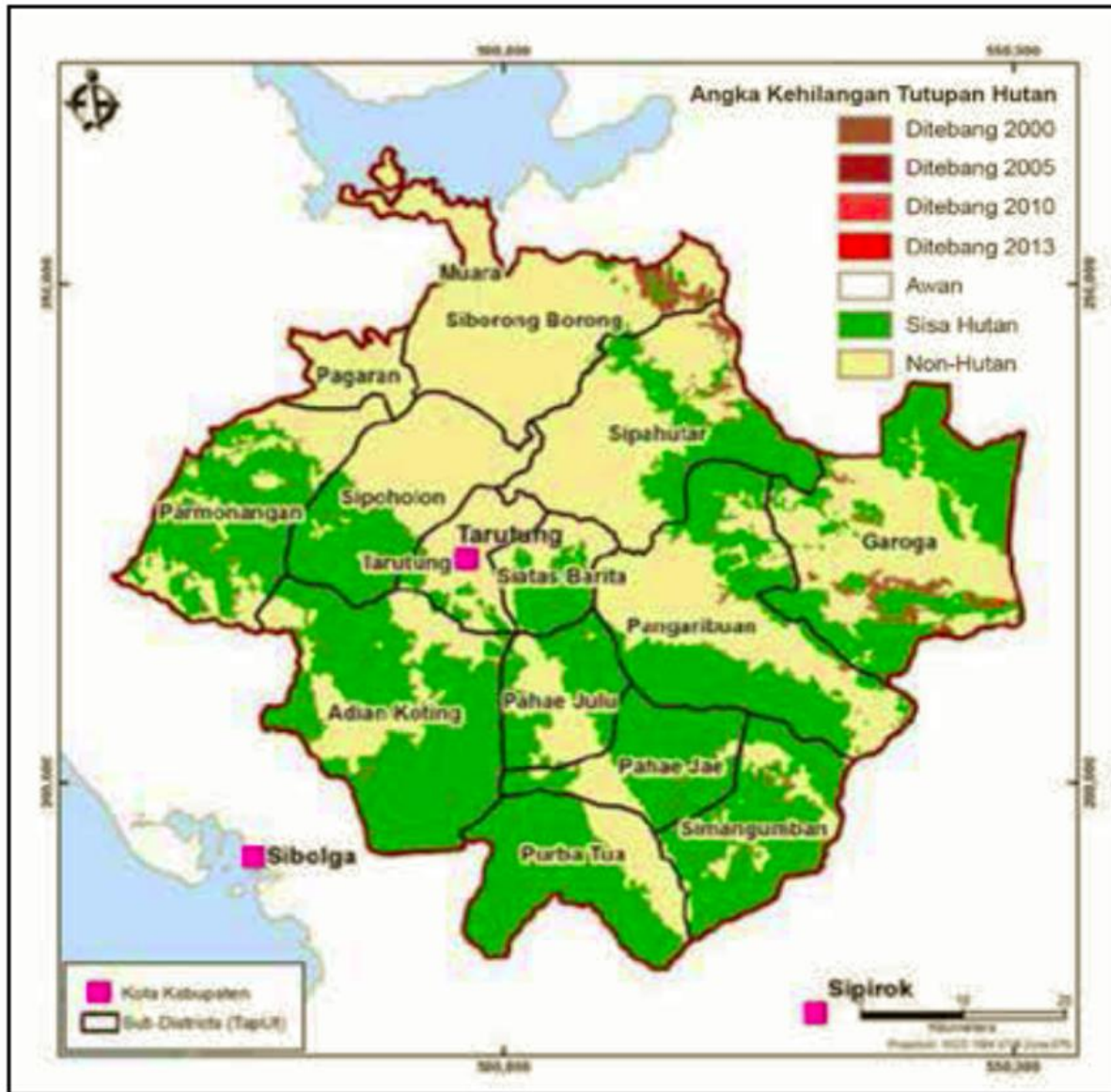
Isu Strategis: Biodiversitas
Baseline Data tahun 2004:
Jumlah biodiversitas 7200 Jenis
Data time series:
1996-2004
Tren:
Th. 2020 cenderung semakin menurun

PROYEKSI EMISI GRK KAB. TAPANULI UTARA

Proyeksi Emisi GRK Berdasarkan Skenario Bussiness as Usual (BaU) Perubahan Tutupan Lahan



Contoh:



**Deforestasi
Kawasan
Hutan Kab.
Tapanuli
Utara 1990-
2030**

Contoh: PERKIRAAN DAMPAK PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP PERUBAHAN TUTUPAN HUTAN PULAU PAPUA 1990-2030



TUTUPAN HUTAN TERUS MENURUN

1990 : 377.550 Km²

2000 : 373.325 Km²

2009 : 364.950 Km²

Kecenderungan 2030: 364.750 Km²

Pengintegrasian Hasil Pelingkupan KLHS ke dalam KRP

INTEGRASI HASIL PELINGKUPAN KE DALAM DOKUMEN PERENCANAAN CONTOH DARI KABUPATEN TAPANULI UTARA 2015

VISI & MISI RPJMD

Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas serta Daerah Wisata

1. Meningkatkan Akses Pendidikan dan Menyiapkan Pendidikan Yang Berkualitas;
2. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Gratis, khususnya di Puskesmas;
3. Menjadikan Tapanuli Utara sebagai Industri Pertanian;
4. Menjamin Ketersediaan Bibit Unggul dan Pupuk Bersubsidi dengan Sistem Bayar Pasca Panen;
5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan untuk Memperluas Pertumbuhan Ekonomi, Penguatan Integrasi Wilayah dan Interkoneksi dengan Kawasan Pembangunan di Sekitarnya;
6. Menjadikan Desa sebagai Pusat Percepatan Pembangunan;
7. Membangun Pemerintahan yang Bersih dan Transparan Serta Berorientasi Pada Pelayanan Public (Good and Clean Governance) dengan Sistem E-Government;
8. Mengembangkan Minat Bakat Generasi Muda Dibidang Seni Budaya dan Olahraga.

ISU SRATEGIS KLHS

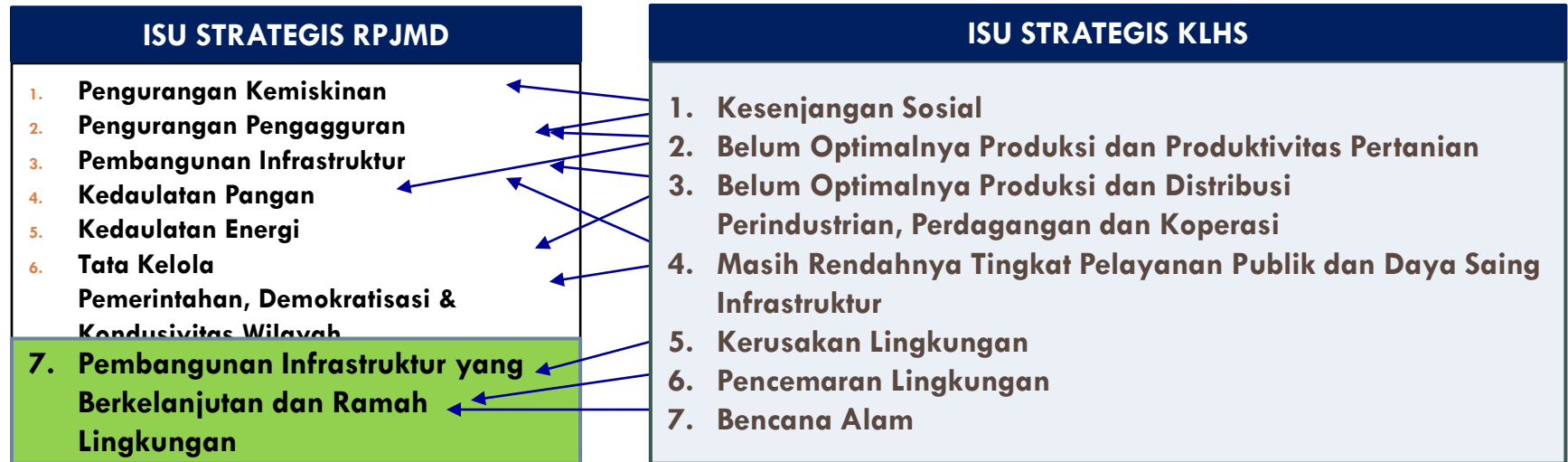
1. Tapanuli Utara semakin panas
2. Menurunnya kualitas dan kuantitas air
3. Besarnya area lahan kritis
4. Degradasi kawasan dan ekosistem hutan
5. Penurunan ekosistem Danau Toba
6. Kerusakan keanekaragaman hayati
7. Rendahnya laju pendapatan perkapita per tahun
8. Rendahnya tingkat kesejahteraan petani
9. Rendahnya laju peningkatan tingkat kesehatan masyarakat
10. Lunturnya nilai budaya dan kearifan lokal
11. Konflik sosial

KEBIJAKAN RTRW

1. Peningkatan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi dan budaya ke seluruh wilayah pengembangan.
2. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup, serta penanggulangan resiko bencana alam.
3. Pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan ruang kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
4. Peningkatan produktifitas sektor-sektor unggulan sesuai dengan daya dukung lahan.
5. Peningkatan Ekonomi Masyarakat berbasis sumber daya alam.
6. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.

INTEGRASI HASIL PELINGKUPAN KE DALAM DOKUMEN PERENCANAAN

CONTOH DARI KLHS RPJMD PROVINSI JAWA TENGAH 2013



1. KLHS mengidentifikasi tiga isu strategis lingkungan hidup yang tidak terakomodasi dalam isu strategis RPJMD
2. Pokja KLHS mengusulkan penambahan isu strategis RPJMD
3. Pokja KLHS mengusulkan penambahan satu Misi baru

Rumusan Misi Tambahan:
Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jateng yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

Misi tambahan dijabarkan sampai ke program prioritas

MASUKAN KLHS DALAM TAHAP AWAL PENYUSUNAN RPJMD

Proses KLHS

**Pelungkupan
(Daftar Pendek & Daftar Panjang
Isu Pembangunan Berkelanjutan)**

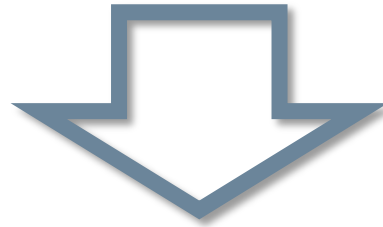
Proses RPJMD

**Analisis
Isu-isu Strategis**

**Perumusan:
Visi dan Misi
Tujuan & Sasaran
Strategi & Arah Kebijakan
Keb. Umum & Program**

**Perumusan:
Indikasi Program Prioritas**

SELANJUTNYA.....



**MODUL
TAHAP PENGAJIAN KLHS**